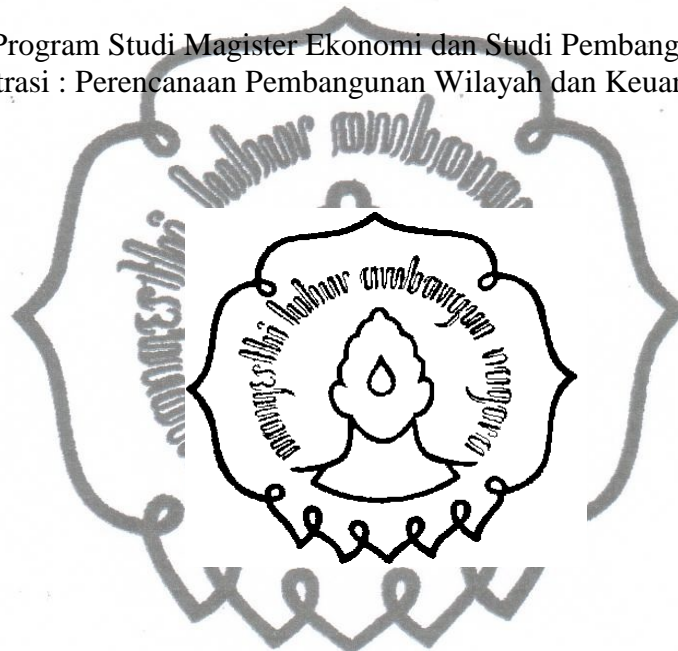


**ANALISIS BELANJA DAERAH KABUPATEN NGAWI
DI ERA OTONOMI DAERAH**

TESIS

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Mencapai Derajat Magister

Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah



Oleh :

**HYLINA INDRIANI
S4210080**

**FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS SEBELAS MARET
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN
SURAKARTA
2011**

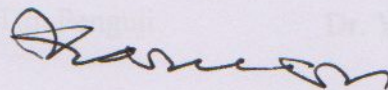
commit to user

**ANALISIS BELANJA DAERAH KABUPATEN NGAWI
DI ERA OTONOMI DAERAH**

Disusun oleh :
HYLINA INDRIANI
S4210080

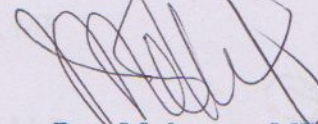
Telah disetujui oleh Pembimbing

Pembimbing I



Dr. JJ. Sarungu, MS.
NIP. 19510701 198010 1 001

Pembimbing II



Drs. Mulyanto, ME.
NIP. 19680623 199302 1 001

Ketua Program Studi
Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan



Dr. JJ. Sarungu, MS
NIP. 19510701 198010 1 001

**ANALISIS BELANJA DAERAH KABUPATEN NGAWI
DI ERA OTONOMI DAERAH**

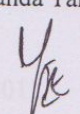
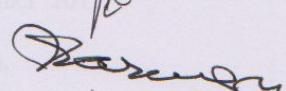
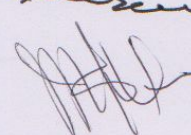
Disusun oleh :

HYLINA INDRIANI

S4210080

Telah disetujui oleh Tim Penguji

Pada tanggal : 13 DESEMBER 2011

Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua Tim Penguji	Dr. Yunastiti P., MP	
Pembimbing Utama	Dr. JJ. Sarungu, M.S	
Pembimbing Pendamping	Drs. Mulyanto, M.E	

Mengetahui

Direktor PPs UNS

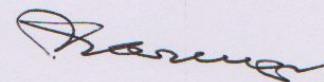


Prof. Drs. Suranto, M.Sc, PhD

NIP. 19570820 198503 1 004

Ketua Program Studi

Magister Ekonomi dan Studi
Pembangunan



Dr. JJ. Sarungu, MS

NIP. 19510701 198010 1 001

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HYLINA INDRIANI

NIM : S4210080

Program Studi : Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan

Konsentrasi : Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Keuangan Daerah

menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil karya sendiri dan bukan merupakan jiplakan dari hasil karya orang lain.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya.


Ngawi, November 2011

Tertanda,



HYLINA INDRIANI

MOTTO



*“Janganlah larut dalam satu kesedihan
karena masih ada hari esok yang menyongsong
dengan sejuta kebahagiaan.”*

commit to user

PERSEMBAHAN



Kupersembahkan karya ini dengan tulus dan penuh rasa syukur kepada :

- *Bapak, Ibu, dan Anaku Tercinta yang selalu memberikan motivasi dan doanya*
- *Kabupaten Ngawi*
- *Serta UNS, Almamater yang selalu Aku Banggakan*

commit to user

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan belanja daerah serta mengetahui proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data runtut waktu antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2010. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, alat analisis yang digunakan adalah rasio dan regresi linier berganda dimana pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen sedangkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai variabel independen. Oleh karena keterbatasan data untuk memenuhi syarat jumlah data dalam analisis regresi linier berganda, maka data yang semula dalam bentuk data tahunan tersebut dirubah menjadi data kuartalan dengan menggunakan metode interpolasi yang dikembangkan oleh Insukrindo.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 memiliki pola kecenderungan menurun walaupun secara nominal meningkat setiap tahunnya. Jika dilihat dari proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah, memperlihatkan bahwa dari Tahun 2003-2010 belanja langsung mengalami penurunan proporsinya terhadap belanja daerah sedangkan belanja tidak langsung mengalami peningkatan proporsinya terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa belanja tidak langsung mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi dengan koefisien sebesar 0,0000002465, sedangkan belanja langsung berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Kata Kunci : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the growth of local expenditure and to know the proportion of direct expenditure and indirect expenditure on Ngawi Regency expenditures, other than that this study also aimed to know the effect of direct expenditure and indirect expenditure on economic growth Ngawi Regency.

The data used in this study is secondary data and time series data of 2003 until the year 2010. Data obtained from the Central Bureau of Statistics Ngawi district, an analytical tool used is the ratio and multiple linear regression in which economic growth as the dependent variable while direct expenditure and indirect expenditure as an independent variable. Because of data limitations to qualify the amount of data in multiple linear regression analysis, the data which was originally in the form of annual data is converted into quarterly data using the interpolation method developed by Insukrindo.

The results of this study gives an overview of government expenditures Ngawi Regency Year 2003-2010 has a tendency to decline, although nominally increasing every year. When viewed from the proportion of direct expenditure and indirect expenditure to total expenditure areas, showing that the direct expenditure of the Year 2003-2010 has decreased while the proportion of expenditures indirect expenditure has increased its proportion of expenditure area. The results of this study can also note that Indirect Expenditures has a positive and significant impact on regional economic growth Ngawi district with a coefficient of 0.0000002465, while the Direct Expenditures positive but not significant effect.

Keywords: Expenditure Direct, Indirect Expenditures, Economic Growth

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala nikmat-nikmat yang tiada terhitung nilainya serta berkat keridhoannya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tesis ini tepat sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Tesis ini berjudul **“ANALISIS BELANJA DAERAH KABUPATEN NGAWI DI ERA OTONOMI DAERAH”**, disusun sebagai salah satu persyaratan mencapai derajat magister pada Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan di Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Dengan segala kekurangan dan kelebihan yang ada pada tesis ini, ucapan terima kasih Penulis sampaikan atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung dalam bentuk moril dan materiil. Selain itu, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati, Penulis juga mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. JJ. Sarungu, M.S selaku Ketua Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan UNS dan selaku Dosen pembimbing I, atas segala bimbingan dan dorongannya untuk segera menyelesaikan Tesis ini;
2. Drs. Mulyanto, M.E selaku Dosen Pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan dan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan Tesis ini;
3. Dosen-dosen yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada Penulis selama menuntut ilmu di Universitas Sebelas Maret Surakarta;

commit to user

4. Segenap pengelola dan staf sekretariat MESP yang selalu membantu dalam kelancaran studi peneliti:
5. Kedua orang tuaku dan seluruh keluarga, terima kasih atas iringan doa dan bantuan moril maupun materil dalam mengikuti perkuliahan dari awal sampai akhir studi;
6. Teman-teman Angkatan XIV, terima kasih atas dukungan dan kebersamaan yang semoga tak akan pernah luntur;
7. Rekan-rekan bimbingan, terima kasih atas kebersamaan dan kekompakannya selama bimbingan sampai dengan terselesaikannya tesis kita;
8. Semua pihak yang telah membantu penyusunan tesis ini, yang tidak dapat Penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT memberikan balasan atas amal kebajikannya.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu saran dan kritik sebagai masukan bagi perbaikan di masa yang akan datang sangat Penulis harapkan. Akhirnya, Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat. Atas segala kekurangan dalam tesis ini Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.

Ngawi, November 2011

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TESIS	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR LAMPIRAN	xix
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	10
1. Sejarah Perkembangan Regulasi Keuangan Pemda	10

commit to user

2. Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah	12
a. Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah	12
1) Konsep dan Pengertian	12
2) Perubahan Struktur APBD.....	16
b. Belanja Daerah.....	18
1) Konsep dan Pengertian	18
2) Perubahan Struktur Belanja Daerah.....	19
3. Pertumbuhan Ekonomi	30
a. Konsep dan Pengertian.....	30
b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah.....	31
c. Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi.....	34
B. Studi Terdahulu.....	35
C. Kerangka Konseptual.....	38
D. Hipotesis	39

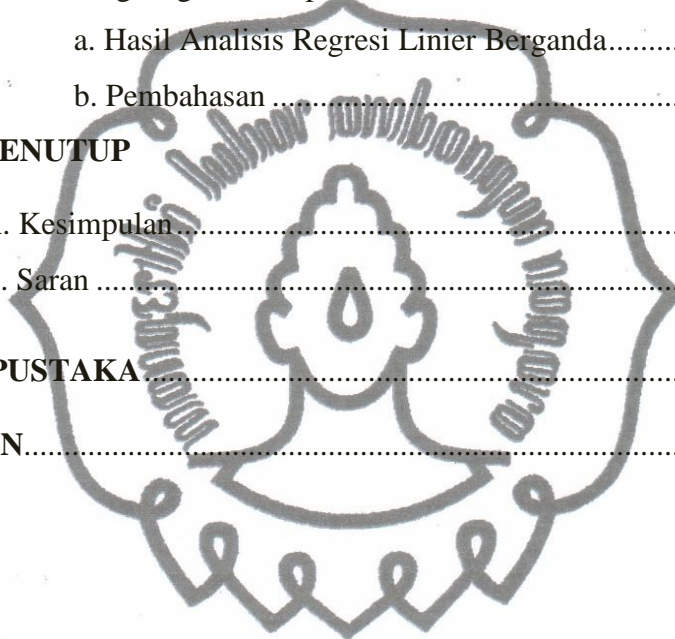
BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian.....	40
B. Jenis dan Sumber Data.....	40
C. Definisi Operasional Variabel	41
D. Teknik Analisis Data	42
1. Analisis Pertumbuhan	42
2. Analisis Kontribusi/Proporsi.....	43
3. Analisis Regresi Linier Berganda	43

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Kabupaten Ngawi.....	50
1. Keadaan Geografis	50
2. Kondisi Pemerintahan	52
3. Indikator Kinerja Pembangunan	56
a. Kondisi Ekonomi Daerah	56
b. Kondisi Sosial Budaya	64
c. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah.....	73

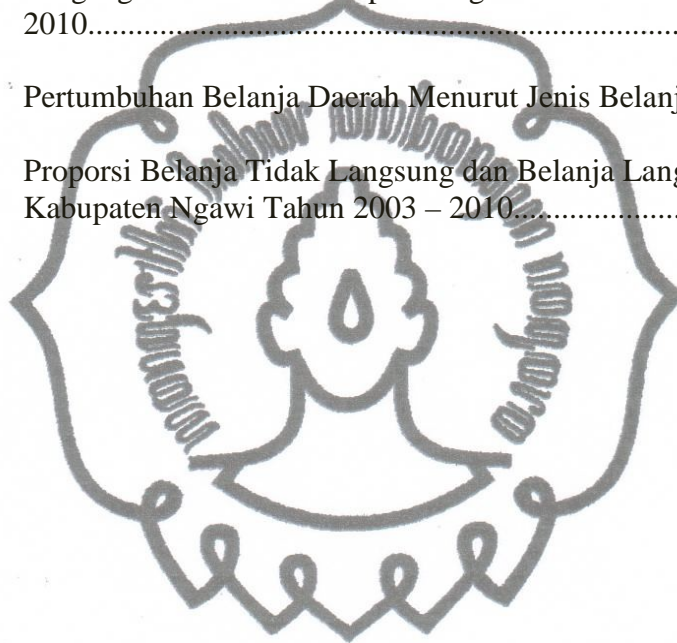
B. Analisis dan Pembahasan.....	75
1. Analisis Pertumbuhan Belanja	75
2. Analisis Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja	
Langsung Terhadap Belanja Daerah	81
3. Analisis Pengaruh Belanja Tidak Langsung dan Belanja.....	
Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi	84
a. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda.....	85
b. Pembahasan	92
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98
LAMPIRAN.....	101



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003 – 2006.....	4
Tabel 1.2	Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 – 2010.....	6
Tabel 2.1	Perbedaan Struktur APBD antara Kepmendagri No. 12/2002 dan Permendagri No. 13/2006.....	17
Tabel 2.2	Perbedaan Tabel Akun antara Kepmendagri No. 12/2002 dan Permendagri No. 13/2006.....	17
Tabel 2.3	Perbedaan Struktur Belanja APBD antara Kepmendagri No. 12/2002 dan Permendagri No. 13/2006.....	28
Tabel 4.1	Perkembangan Jumlah PNS Menurut Pendidikan Tahun 2007 – 2010.....	52
Tabel 4.2	PDRB Kabupaten Ngawi Menurut Lapangan Usaha Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2006-2008.....	58
Tabel 4.3	PDRB Kabupaten Ngawi menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan (2000) Tahun 2006-2008.....	59
Tabel 4.4	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi Tahun 2007 – 2010.....	62
Tabel 4.5	Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007 – 2010.....	64
Tabel 4.6	Jumlah Penduduk menurut Jenis Kelamin Tahun 2010.....	66
Tabel 4.7	Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2010.....	67
Tabel 4.8	Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2008-2009.....	70
Tabel 4.9	Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kabupaten Ngawi Tahun 2007-2009.....	71

Tabel 4.10	Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun 2007-2009.....	72
Tabel 4.11	Panjang Jalan menurut Jenis, Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Ngawi Tahun 2010.....	73
Tabel 4.12	Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003 – 2010.....	75
Tabel 4.13	Pengangkatan CPNS Kabupaten Ngawi Tahun 2005 – 2010.....	78
Tabel 4.14	Pertumbuhan Belanja Daerah Menurut Jenis Belanja.....	80
Tabel 4.15	Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Kabupaten Ngawi Tahun 2003 – 2010.....	82



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Konversi Belanja Daerah antara Makuda, Kepmendagri No. 29/2002 Dan Permendagri 13/2006.....	29
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Studi.....	38
Gambar 4.1 Peta Kabupaten Ngawi.....	51
Gambar 4.2 Bagan Struktur Organisasi.....	53
Gambar 4.3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi	61
Gambar 4.4 Grafik Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi.....	77
Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Belanja Daerah Menurut Jenisnya.....	79
Gambar 4.6 Grafik Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Proporsi Belanja Langsung Tahun 2003-2010.....	83
Gambar 4.8 Scatterplot.....	88

commit to user

DAFTAR LAMPIRAN

		Halaman
Lampiran 1	Hasil Transformasi Belanja dari Kpmendagri 29/2002 menjadi permendagri 13/2006.....	102
Lampiran 2	Hasil Interpolasi Data Belanja Tidak Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010.....	103
Lampiran 3	Hasil Interpolasi Data Belanja Langsung Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010.....	104
Lampiran 4	Hasil Interpolasi Data PDRB Harga Konstan Tahun 2000 Tahun 2003-2010.....	105
Lampiran 5	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 dalam Kwartalan.....	106
Lampiran 6	Hasil Olah Data Regresi Linier Berganda pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Ngawi Menggunakan Aplikasi SPSS 16.....	107

commit to user

ABSTRAK**ANALISIS BELANJA DAERAH KABUPATEN NGAWI
DI ERA OTONOMI DAERAH**

Oleh

HYLINA INDRIANI**NIM : S4210080**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan belanja daerah serta mengetahui proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi, selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan merupakan data runtut waktu antara Tahun 2003 sampai dengan Tahun 2010. Data diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, alat analisis yang digunakan adalah rasio dan regresi linier berganda dimana pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen sedangkan belanja langsung dan belanja tidak langsung sebagai variabel independen. Oleh karena keterbatasan data untuk memenuhi syarat jumlah data dalam analisis regresi linier berganda, maka data yang semula dalam bentuk data tahunan tersebut dirubah menjadi data kuartalan dengan menggunakan metode interpolasi yang dikembangkan oleh Insukrindo.

Hasil penelitian ini memberikan gambaran pertumbuhan belanja daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 memiliki pola kecenderungan menurun walaupun secara nominal meningkat setiap tahunnya. Jika dilihat dari proporsi belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap total belanja daerah, memperlihatkan bahwa dari Tahun 2003-2010 belanja langsung mengalami penurunan proporsinya terhadap belanja daerah sedangkan belanja tidak langsung mengalami peningkatan proporsinya terhadap belanja daerah. Hasil penelitian ini juga dapat diketahui bahwa belanja tidak langsung mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi dengan koefisien sebesar 0,0000002465, sedangkan belanja langsung berpengaruh positif tetapi tidak signifikan.

Kata Kunci : Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung, Pertumbuhan Ekonomi

ABSTRACT**ANALYSIS OF GOVERNMENT EXPENDITURE
ON NGAWI REGENCY IN THE ERA OF AUTONOMY**

By

HYLINA INDRIANI**NIM : S4210080**

The purpose of this study was to determine the growth of local expenditure and to know the proportion of direct expenditure and indirect expenditure on Ngawi Regency expenditures, other than that this study also aimed to know the effect of direct expenditure and indirect expenditure on economic growth Ngawi Regency.

The data used in this study is secondary data and time series data of 2003 until the year 2010. Data obtained from the Central Bureau of Statistics Ngawi district, an analytical tool used is the ratio and multiple linear regression in which economic growth as the dependent variable while direct expenditure and indirect expenditure as an independent variable. Because of data limitations to qualify the amount of data in multiple linear regression analysis, the data which was originally in the form of annual data is converted into quarterly data using the interpolation method developed by Insukrindo.

The results of this study gives an overview of government expenditures Ngawi Regency Year 2003-2010 has a tendency to decline, although nominally increasing every year. When viewed from the proportion of direct expenditure and indirect expenditure to total expenditure areas, showing that the direct expenditure of the Year 2003-2010 has decreased while the proportion of expenditures indirect expenditure has increased its proportion of expenditure area. The results of this study can also note that Indirect Expenditures has a positive and significant impact on regional economic growth Ngawi district with a coefficient of 0.0000002465, while the Direct Expenditures positive but not significant effect.

Keywords: Expenditure Direct, Indirect Expenditures, Economic Growth

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang materiil dan spritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945 di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan ini mencerminkan upaya untuk menjamin stabilitas pertumbuhan dan Pemerataan.

Sejak berlakunya kebijakan otonomi daerah, terjadi perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan mekanisme pemerintahan di daerah, dimana otonomi benar-benar akan terlaksana dan menjadi kenyataan, sehingga diperlukan suatu kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyusun anggaran baik dari sisi penerimaan maupun sisi pengeluaran. Penyelenggaraan otonomi daerah ini didukung oleh UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, yang kini direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 dan UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan, yang kini direvisi menjadi UU nomor 33 Tahun 2004.

Salah satu perubahan penting adalah kewenangan daerah yang semakin besar dalam menentukan kebijakan belanja daerah (*decentralized expenditure*). Daerah mempunyai keleluasaan untuk mengalokasikan belanjanya ke dalam pos-pos belanja yang dianggap prioritas sesuai preferensi masing-masing daerah. Hal ini sejalan dengan teori *fiscal federalism* yang menyatakan bahwa "*commit to user* daerah lebih paham apa yang terbaik buat mereka".

Dengan Otonomi terdapat dua aspek kinerja keuangan yang dituntut agar lebih baik dibanding sebelum otonomi daerah. Aspek pertama adalah bahwa daerah diberi kewenangan mengurus pembiayaan daerah dengan kekuatan utama pada kemampuan Pendapatan Asli Daerah (Desentralisasi Fiskal). Aspek yang kedua yaitu dari sisi manajemen pengeluaran daerah, bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah harus lebih akuntabel dan transparan tentunya menuntut daerah agar lebih efisien dan efektif dalam pengeluaran daerah. Kedua aspek tersebut dapat disebut sebagai reformasi pembiayaan (Mardiasmo,2002:50).

Salah satu regulasi yang memuat reformasi pembiayaan adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Permendagri No.13/2006). Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang kini telah direvisi dengan Permendagri Nomor 59 tahun 2007 mengisyaratkan bahwa efektifitas atas pengelolaan dana-dana yang dikelolanya, pemerintah daerah diwajibkan menyiapkan laporan keuangan daerah sebagai bagian dari Laporan Pertanggungjawaban kepala daerah. Anggaran daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, serta alat otoritas pengeluaran di masa yang akan datang.

Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004, sumber pendapatan daerah terdiri dari atas : Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu : hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah : dana perimbangan; dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah, dan Pasal 167 yang termasuk dalam belanja daerah terdiri dari Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung.

Pendapatan daerah merupakan sumber untuk membiayai belanja daerah (belanja langsung dan belanja tidak langsung). Seharusnya, pengalokasian pendapatan daerah ke belanja langsung harus lebih besar daripada ke belanja tidak langsung. Hal ini dikarenakan belanja langsung merupakan suatu tindakan pengeluaran biaya untuk menciptakan pembangunan yang nantinya berguna untuk kesejahteraan rakyat. Namun, kebanyakan fenomena sekarang ini memperlihatkan bahwa pengalokasian belanja langsung lebih kecil daripada pengalokasian belanja tidak langsung. Contohnya penelitian yang dilakukan Dibyو Prabowo pada Tahun 2001 yang meneliti beberapa kabupaten /kota di Indonesia, dan dalam penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar (berkisar 80%-90%) DAU masih dipergunakan untuk anggaran rutin (terutama gaji pegawai), sedangkan alokasi untuk anggaran pembangunan hanya berkisar 10%-20%. (Hamid, 2004:117). Melalui kewenangan otonomi yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah Kabupaten Ngawi, maka sudah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Ngawi dalam membelanjakan anggaran yang ada agar dimanfaatkan seefisien dan seefektif mungkin untuk pembangunan daerahnya.

Tabel 1.1 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2006 Menurut Kepmendagri 29/2002
(dalam satuan juta)

Uraian Belanja	2003	%	2004	%	2005	%	2006	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. BELANJA APARATUR	68.148,70	18,92	68.802,40	18,93	72.588,80	21,95	137.711,10	28,49
B. Administrasi Umum	49.342,70	13,70	49.550,90	13,64	55.052,50	16,65	117.766,60	24,36
Belanja Pegawai / Personalia	39.597,60	11,00	41.050,90	11,30	41.592,30	12,58	80.530,50	16,66
Belanja Barang dan Jasa	5.860,40	1,63	4.689,90	1,29	9.505,50	2,87	26.718,10	5,53
Belanja Perjalanan Dinas	2.054,90	0,57	2.008,20	0,55	2.190,30	0,66	4.735,30	0,98
Belanja Pemeliharaan	1.829,80	0,51	1.801,90	0,50	1.764,40	0,53	5.782,70	1,20
B. Operasi dan Pemeliharaan	18.370,30	5,10	18.773,10	5,17	3.770,80	1,14	10.083,50	2,09
Belanja Pegawai / Personalia	9.141,10	2,54	10.955,20	3,01	821,90	0,25	603,80	0,12
Belanja Barang dan Jasa	312,00	0,09	320,00	0,09	1.425,60	0,43	7.575,00	1,57
Belanja Perjalanan Dinas	8.526,90	2,37	7.031,60	1,94	949,40	0,29	1.691,10	0,35
Belanja Pemeliharaan	390,30	0,11	466,30	0,13	573,90	0,17	213,60	0,04
B. Modal	435,70	0,12	478,40	0,13	999,70	0,30	9.861,00	2,04
B. Bagi Hasil dan Bantuan Keu					12.520,80		0,00	
B. Tidak Tersangka	0,00	0,00	0,00	0,00	245,00	0,07	0,00	0,00
2. BELANJA PUBLIK	291.974,20	81,08	294.575,77	81,07	258.147,80	78,05	345.672,10	71,51
B. Administrasi Umum	169.660,70	47,11	185.491,87	51,05	216.026,80	65,32	217.208,40	44,94
Belanja Pegawai / Personalia	166.063,00	46,11	180.880,67	49,78	199.986,00	60,47	215.949,70	44,67
Belanja Barang dan Jasa	1.262,40	0,35	1.434,40	0,39	12.832,30	3,88	658,70	0,14
Belanja Perjalanan Dinas	1.379,80	0,38	1.911,70	0,53	733,40	0,22	0,00	0,00

Berlanjut ke halaman 5

..... Tabel 2.1. Lanjutan halaman 4

	Belanja Pemeliharaan	955,50	0,27	1.265,10	0,35	2.475,10	0,75	600,00	0,12
	B. Operasi dan Pemeliharaan	12.176,80	3,38	13.947,10	3,84	9.873,70	2,99	44.974,60	9,30
	Belanja Pegawai / Personalia	6.800,80	1,89	7.470,40	2,06	847,70	0,26	1.694,90	0,35
	Belanja Barang dan Jasa	665,00	0,18	389,00	0,11	5.173,70	1,56	26.668,20	5,52
	Belanja Perjalanan Dinas	880,40	0,24	960,70	0,26	493,50	0,15	3.250,50	0,67
	Belanja Pemeliharaan	3.830,60	1,06	5.127,00	1,41	3.358,80	1,02	13.361,00	2,76
	B. Modal	95.042,40	26,39	79.955,90	22,00	15.620,80	4,72	53.976,50	11,17
	B. Bagi Hasil dan Bantuan Keu	13.094,30	3,64	13.260,60	3,65	16.626,50	5,03	29.212,60	6,04
	B. Tidak Tersangka	2.000,00	0,56	1.920,30	0,53	0,00	0,00	300,00	0,06
	JUMLAH TOTAL	360.122,90	100,00	363.378,17	100,00	330.736,60	100,00	483.383,20	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi, 2010 (diolah)

Tabel 1.2 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007-2010 Menurut Permendagri 13/2006

Jenis Belanja	2007	%	2008	%	2009	%	2010	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1. B. TIDAK LANGSUNG	378.020,8	59,58	483.831,6	63,63	605.657,1	75,36	728.460,7	69,98
a. Belanja Pegawai	314.878,8	49,63	397.746,5	52,31	479.018,7	59,60	689.575,0	66,24
b. Belanja Bunga	161,3	0,025	137,2	0,018	109,7	0,014	56,8	0,005
c. Belanja Hibah	10.250,5	1,62	13.682,1	1,80	77.959,1	9,70	11.567,0	1,11
d. Belanja Bantuan Sosial	5.933,3	0,94	11.085,4	1,46	5.588,8	0,70	6.399,0	0,61
e. Belanja Bagi Hasil	25.000,0	3,940	1.364,8	0,179	1.549,0	0,193		-
f. Belanja Bantuan Keuangan	20.435,4	3,22	44.321,9	5,83	41.431,8	5,16	20.691,3	1,99
g. Belanja Tidak Terduga	1.361,5	0,21	15.493,7	2,04	-	-	171,6	0,02
2. B. LANGSUNG	256.485,2	40,42	276.519,2	36,37	198.017,2	24,64	312.554,8	30,02
a. Belanja Pegawai	45.565,0	7,18	41.279,5	5,43	28.353,9	3,53	22.550,4	2,17
b. Belanja Barang dan Jasa	117.857,8	18,57	80.071,3	10,53	67.991,9	8,46	121.967,6	11,72
c. Belanja Modal	93.062,4	14,67	155.168,4	20,41	101.671,4	12,65	168.036,8	16,14
JUMLAH TOTAL	634.506,0	100,00	760.350,8	100,00	803.674,3	100,00	1.041.015,5	100,00

Sumber : BPS Kabupaten Ngawi, 2010 (diolah)

Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Ngawi Tahun 2010, dapat dilihat bahwa realisasi belanja daerah terhadap belanja langsung adalah sebesar Rp. 312.554.870.000,- dan pada belanja tidak langsung sebesar Rp. 728.460.676.000,- dari total belanja sebesar Rp.1.041.015.546.000,-. Pada tahun tersebut, pengalokasian belanja langsung lebih kecil dari pada belanja tidak langsung. Hal ini tidak sesuai dengan teori komposisi ideal yang diharapkan dalam pengalokasian belanja daerah terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung adalah sebesar 70% : 30% dan sesuai dengan Permendagri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2010 Belanja daerah disusun dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari yang direncanakan dan diupayakan agar Belanja Langsung mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Modal mendapat porsi alokasi yang lebih besar dari Belanja Pegawai atau Belanja Barang dan Jasa. Aji Sofyan Effendi, mengatakan, belanja publik idealnya 60 sampai 70 persen dari nilai APBD (Kompas 2 Pebruari 2009) . Jika dibandingkan antara teori dengan kenyataan yang terjadi di Tahun 2010, komposisi pengalokasian belanja daerah terhadap belanja langsung dan tidak langsung yang terjadi di Kabupaten Ngawi tidak memenuhi syarat komposisi ideal karena belanja pemerintah daerah secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada kualitas pelayanan publik dan mendorong aktivitas sektor swasta Kabupaten Ngawi. Dengan otonomi dan desentralisasi fiskal diharapkan dapat meningkatkan efisiensi penyediaan barang publik dan

regulasi lokal, sehingga kualitas pelayanan publik semakin baik dan produktivitas ekonomi daerah semakin meningkat. Berkaitan peran tersebut maka peran optimalisasi belanja daerah akan mempengaruhi pembangunan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi

Berdasarkan uraian di atas dan fenomena yang terjadi di lapangan, khususnya di Kabupaten Ngawi, untuk mengetahui perkembangan pertumbuhan belanja daerah terhadap belanja langsung dan belanja tidak langsung dan mengetahui apakah memang selalu tidak memenuhi syarat setiap tahunnya atau mungkin hanya terjadi di Tahun 2010 saja kejadian itu terjadi. Oleh karena itu, maka penelitian untuk mencari tahu bagaimana pertumbuhan belanja dan proporsi komposisi belanja daerah menurut kelompok dan jenisnya di Kabupaten Ngawi serta pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi di era otonomi daerah.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan diatas, yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 ?
2. Bagaimana proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap belanja daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010

3. Bagaimana pengaruh belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

1. Mengetahui pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dari Tahun 2003 - 2010
2. Mengetahui proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap belanja daerah Tahun 2003-2010
3. Mengetahui pengaruh belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010?

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk :

1. Secara teoritis, memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademis secara kritis di yang berhubungan dengan keuangan daerah khususnya mengenai belanja daerah di masa yang akan datang.
2. Secara praktis. dalam hal ini memberikan bahan masukan dalam menentukan kebijakan dan strategi khusus mengenai belanja daerah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Sejarah Perkembangan Regulasi Keuangan Pemerintah Daerah

Perjalanan penyelenggaraan pemerintahan dan otonomi di Indonesia sebenarnya telah dimulai sejak Tahun 1974 ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah. Namun undang-undang ini tidak terlaksana sebagaimana yang diharapkan. Seiring perubahan iklim politik yang ditandai dengan terjadinya reformasi penyelenggaraan pemerintahan pada Tahun 1998 maka tuntutan terhadap otonomi daerah yang lebih luas dapat terwujud yang ditandai dengan berlakunya Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang undang No. 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Transisi kebijakan otonomi daerah selanjutnya ditandai dengan perubahan payung hukum otonomi daerah menjadi Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Perubahan terhadap payung hukum tersebut membawa konsekuensi terhadap penyesuaian sub sistem dan prosedur penyelenggaraan pemerintahan di daerah termasuk keuangan daerah.

Sumber hukum utama keuangan daerah pada awalnya diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan pengawasan Keuangan Daerah serta Peraturan

commit to user

Pemerintah No. 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Selanjutnya pengaturan itu dibakukan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu Permendagri No. 900/099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA), Permendagri No. 020-595 tentang Manual Administrasi Barang Daerah (MABADA) dan Permendagri No. 970 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah (MAPATDA).

Dalam masa pemberlakuan Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang kemudian diatur lebih teknis dengan Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD.

Seiring dengan transisi penyelenggaraan otonomi daerah yang ditandai dengan pemberlakuan Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan diberlakukannya paket perundangan tentang reformasi pengelolaan keuangan negara telah membawa implikasi terhadap perubahan sistem pengelolaan keuangan daerah. Beberapa perundangan utama yang mengatur tentang tata kelola pengelolaan keuangan daerah diantaranya adalah :

commit to user

- a. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,
- b. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- c. Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah direvisi dengan :
 - 1). Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
 - 2). Permendagri No. 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Pengelolaan Keuangan Daerah di Era Otonomi Daerah

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1) Konsep dan Pengertian

Anggaran adalah rencana pendapatan dan belanja yang dibuat suatu unit pemerintahan untuk suatu periode tertentu. Bila anggaran dibuat sesuai dengan persyaratan perundang-undangan dan disahkan maka anggaran tersebut menjadi dasar untuk pelaksanaan dan pengendalian kegiatan keuangan periode tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Sejak Repelita I Tahun 1967 sampai dengan pertengahan Repelita IV

Tahun 1999, APBD di Indonesia disusun menurut tahun anggaran yang dimulai pada tanggal 1 April dan berakhir 31 Maret tahun berikutnya. Dimulai sejak Tahun 2001 sampai saat ini pendapatan dan belanja daerah di Indonesia disusun menurut tahun anggaran yang dimulai pada Tanggal 1 Januari dan berakhir 31 Desember.

Terdapat beberapa definisi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Definisi-definisi tersebut dapat dilihat dari pendapat beberapa ekonom berikut :

a). Menurut Halim (2002:16),

APBD adalah suatu Anggaran daerah. APBD memiliki unsur-unsur:

- (1) rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraian secara rinci
- (2) adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutup biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas-aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran-pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- (3) jenis kegiatan dan proyek yang akan dituangkan dalam bentuk angka
- (4) periode anggaran yaitu biasanya 1 (satu) tahun

b). Menurut Saragih (2003:122), "Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah dasar dari pengelolaan keuangan daerah dalam tahun anggaran tertentu, umumnya satu tahun"

c). Dalam melaksanakan pemerintahan, salah satu aspek yang harus diatur secara hati-hati ialah anggaran daerah. Menurut Mardiasmo dalam Munir, dkk (2004:9),

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah instrumen kebijakan daerah, anggaran

daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektifitas Pemerintah Daerah. Anggaran Daerah seharusnya dipergunakan sebagai alat untuk menentukan besarnya pendapatan dan pengeluaran, alat bantu untuk pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, alat bantu otoritas pengeluaran di masa yang akan datang, dan sebagai ukuran standar untuk evaluasi kinerja serta alat koordinasi bagi semua aktivitas berbagai unit kerja.

Dari ketiga definisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di atas maka dapat disimpulkan bahwa APBD merupakan suatu rincian kegiatan suatu daerah yang memuat tentang sumber penerimaan dan semua pengeluaran daerah yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas pemerintah daerah yang di untuk satu tahun dan digunakan untuk mengambil keputusan dan perencanaan pembangunan, serta sebagai standar untuk mengukur evaluasi kinerja pemerintah daerah. Penyusunan APBD sangatlah penting, khususnya dalam rangka penyelenggaran fungsi daerah otonom yaitu untuk :

- a) Menentukan jumlah pajak yang dibebankan kepada rakyat daerah yang bersangkutan
- b) Merupakan suatu sarana untuk mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab
- c) Memberi isi dan arti kepada tanggung jawab Pemerintah daerah umumnya dan Kepala Daerah khususnya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah itu menggambarkan seluruh perencanaan kebijakan Pemerintah Daerah

- d) Merupakan suatu sarana untuk melaksanakan pengawasan terhadap daerah dengan cara yang lebih mudah dan berhasil guna
- e) Merupakan suatu pemberian kuasa kepada kepala daerah untuk melaksanakan penyelenggaraan keuangan daerah di dalam batas-batas tertentu
- f) APBD harus disusun dengan mengikutsertakan perencanaan jangka panjang yang baik dan mempertimbangkan dengan seksama skala prioritas, selanjutnya dalam pelaksanaannya haruslah terarah pada sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan cara yang berdaya guna dan berhasil guna.

Seiring berjalannya waktu, dalam rangka penyempurnaan sistem pengelolaan keuangan maka dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami perubahan. APBD yang sebelumnya disusun dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 yang berisikan tentang pedoman pengurusan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah serta tata cara penyusunan anggaran dan pendapatan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangandaerah dan pentusunan perhitungan anggaran pendapatan dan belanja daerah, kini pedoman penyusunan APBD tersebut telah diganti dengan Permendagri Nomor 13 tahun 2006 yang berisikan tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Perubahan ini

mengakibatkan perubahan struktur dasar APBD (kode akun dan kode rekening penganggaran)

2) Perubahan Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Sesuai dengan ketetapan Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1974 maka azas penganggaran yang dianut adalah anggaran berimbang dan dinamis dimana harus ada perimbangan antara pendapatan dan belanja serta tidak dimungkinkan adanya hutang dan pembiayaan yang mungkin dapat menjadi penyeimbang surplus atau defisit anggaran. Dengan demikian, struktur APBD pada masa itu hanya terdiri dari Pendapatan dan Belanja. Pendapatan terdiri dari Sisa lebih tahun lalu, Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Sumbangan dan Bantuan serta Penerimaan Pembangunan. Belanja terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan.

Struktur APBD yang diamanatkan Kepmendagri 29/2002, Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 menganut azas surplus/defisit anggaran, dimana dimungkinkan adanya pos pembiayaan untuk mengakomodasi kondisi anggaran surplus ataupun defisit. Dengan demikian, struktur APBD pasca reformasi terdiri dari Pendapatan, Belanja dan pembiayaan.

Pendapatan Terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak serta Pendapatan Lain-Lain.

Tabel 2.1 Perbandingan Struktur APBD antara Kepmendagri No. 29/2002 dan Permendagri No. 13/2006

Kepmendagri No. 29/2002	Permendagri No. 13/2006
(1)	(2)
Strukturnya terdiri dari : Pasal dan ayat	Strukturnya terdiri dari Rekening
Terpisah pisah dan berorientasi pada pos-pos belanja dan pendapatan	Integrated meliputi Rekening Pendapatan, Belanja, pembiayaan, dan pos-pos neraca
Numeric dan Alphabetic	Numeric

Sumber Diolah dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Permendagri No 13 Tahun 2006

Tabel 2.2 Perbandingan Tabel Akun antara Kepmendagri No. 29/2002 dan Permendagri No. 13/2006

Kepmendagri No. 29/ 2002	Permendagri No. 13/2006
(1)	(2)
1 : Pendapatan	1 : Asset
2 : Belanja	2 : Kewajiban
3 : Pembiayaan	3 : Ekuitas dana
4 : Aktiva	4 : Pendapatan
5 : Utang	5 : Belanja
6 : Ekuitas	6 : Pembiayaan Daerah

Sumber Diolah dari Kepmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Permendagri No 13 Tahun 2006

Selanjutnya perbedaan struktur anggaran antara yang diamanatkan Kepmendagri 29/2002 dengan yang diamanatkan oleh Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 adalah pada struktur belanja sedangkan struktur pendapatan dan pembiayaannya sama. Pada APBD versi Kepmendagri No 29/2002, belanja terdiri dari belanja Aparatur dan publik yang dibagi kedalam jenis belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal. Pada APBD versi Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007, belanja hanya dikategorikan ke dalam belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan, sedangkan belanja tidak langsung terkait dengan belanja pegawai berupa gaji dan tunjangan yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan.

b. Belanja Daerah

1) Konsep dan Pengertian

Belanja daerah dipergunakan dalam rangka membiayai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/kota yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu

antara pemerintah daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Ulum (2005:204),

Belanja adalah semua pengeluaran kas umum negara/kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah pusat/daerah. Belanja ditetapkan dengan dokumen otorisasi kredit anggaran (allotment)

Menurut Bastian (2001:144),

Biaya dapat dikategorikan sebagai belanja dan beban. Belanja adalah jenis biaya yang timbulnya berdampak langsung kepada berkurangnya saldo kas maupun uang entitas yang berada di bank.

Belanja operasi meliputi pengeluaran barang dan jasa (belanja pegawai, belanja barang dan jasa lain-lain), pembayaran cicilan bunga utang, subsidi, anggaran pengeluaran sektoral (*current transfer*), sumbangan dan bantuan.

2) Perubahan Struktur Belanja Daerah

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan APBD, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan APBD. Selanjutnya pengaturan itu dibakukan dengan peraturan Menteri Dalam Negeri, yaitu Permendagri No. 900/099 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA), belanja terdiri dari belanja rutin dan belanja pembangunan. Selanjutnya perbedaan struktur anggaran antara yang diamanatkan Kepemendagri

29/2002 dengan yang diamanatkan oleh Permendagri 13/2006 dan Permendagri 59/2007 adalah pada struktur belanja sedangkan struktur pendapatan dan pembiayaannya sama. Pada APBD versi Kepmendagri No 29/2002, belanja terdiri dari belanja aparatur dan publik yang dibagi kedalam jenis belanja administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan serta belanja modal.

Untuk lebih menguatkan lagi secara hukum, berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002, “Belanja Daerah adalah semua pengeluaran kas daerah dalam periode tahun anggaran tertentu yang menjadi beban daerah.” Pengelompokan belanja daerah menurut Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 meliputi :

- a) Belanja Aparatur Daerah, yang dirinci sebagai berikut :
 - (1) Belanja Administrasi umum
 - (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
 - (3) Belanja Modal
- b) Belanja Pelayanan Publik
 - (1) Belanja Administrasi umum
 - (2) Belanja Operasi dan Pemeliharaan
 - (3) Belanja Modal
- c) Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan yang dianggarkan untuk pengeluaran dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti lazimnya yang terjadi dalam transaksi pembelian dan penjualan
 - (2) Tidak mengharapkan akan diterima kembali di masa yang akan datang seperti lazimnya piutang
 - (3) Tidak mengharapkan adanya hasil seperti lazimnya suatu penyertaan modal atau investasi
- d) Belanja Tidak Tersangka dianggarkan untuk pengeluaran penanganan bencana alam, bencana sosial atau pengeluaran lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah daerah.

Perubahan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Pemerintah Daerah yang sebelumnya disusun dengan berpedoman pada Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 dan kini berubah berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan sebagian dirubah lagi dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, mengakibatkan definisi dan pengelompokan belanja daerah di pemerintah juga ikut berubah. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, “ Belanja daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih”. Belanja daerah terbagi menjadi dua, yaitu :

commit to user

- a) Belanja Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal
- b) Belanja Tidak Langsung, yaitu belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga.

Untuk lebih rinci lagi, pengelompokan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dapat dilihat sebagai berikut :

- a) Belanja Langsung
- (1) Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negri Sipil(PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh negara yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan dimana pekerjaan tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan pembentukan modal.

commit to user

- (2) Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan jasa yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan, dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat dan belanja perjalanan.

Belanja ini digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah. Pembelian/pengadaan barang dan/pemakaian jasa tersebut mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawai, pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

- (3) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap berwujud dan aset lainnya yang
commit to user

memberikan manfaat lebih dari (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga beli/bangun ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembaniunan aset sampai aset tersebut siap digunakan dan kepala daerah menetapkan batas minimal kapitalisasi sebagaimana dasar pembebanan belanja modal. Untuk mengetahui apakah suatu belanja dapat dimasukkan sebagai belanja modal atau tidak, maka perlu diketahui definisi aset tetap atau aset lainnya dengan kriteria kapitalisasi aset tetap.

b) Belanja Tidak langsung

- (1) Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh negara yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Dalam Permendagri 13/2006 belanja pegawai terdiri dari :

- (a) belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lain yang diberikan

commit to user

kepada PNS sesuai ketentuan perundang-undangan

- (b) uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan:

- (2) Belanja Bunga adalah pengeluaran pemerintah untuk pembayaran bunga (*interest*) atas kewajiban penggunaan pokok hutang (*principal outstanding*) yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang.
- (3) Subsidi adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, atau mengimpor barang dan jasa untuk memenuhi hajat hidup orang banyak sedemikian rupa sehingga harga jualnya dapat terjangkau.
- (4) Hibah digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang dan/barang kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Hibah kepada pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan

penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, hibah kepada perusahaan daerah bertujuan untuk menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat, hibah kepada pemerintah daerah lainnya bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan pemerintah daerah dan layanan dasar umum, hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

(5) Bantuan sosial adalah transfer uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bantuan sosial dapat langsung diberikan kepada anggota masyarakat dan/atau lembaga kemasyarakatan termasuk didalamnya bantuan untuk lembaga non pemerintah bidang kepemudaan, kewanitaan dan keagamaan

(6) Belanja Bagi Hasil

Belanja Bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan propinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada

pemerintah daerah lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan.

(7) Bantuan Keuangan

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari propinsi kepada kabupate/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan

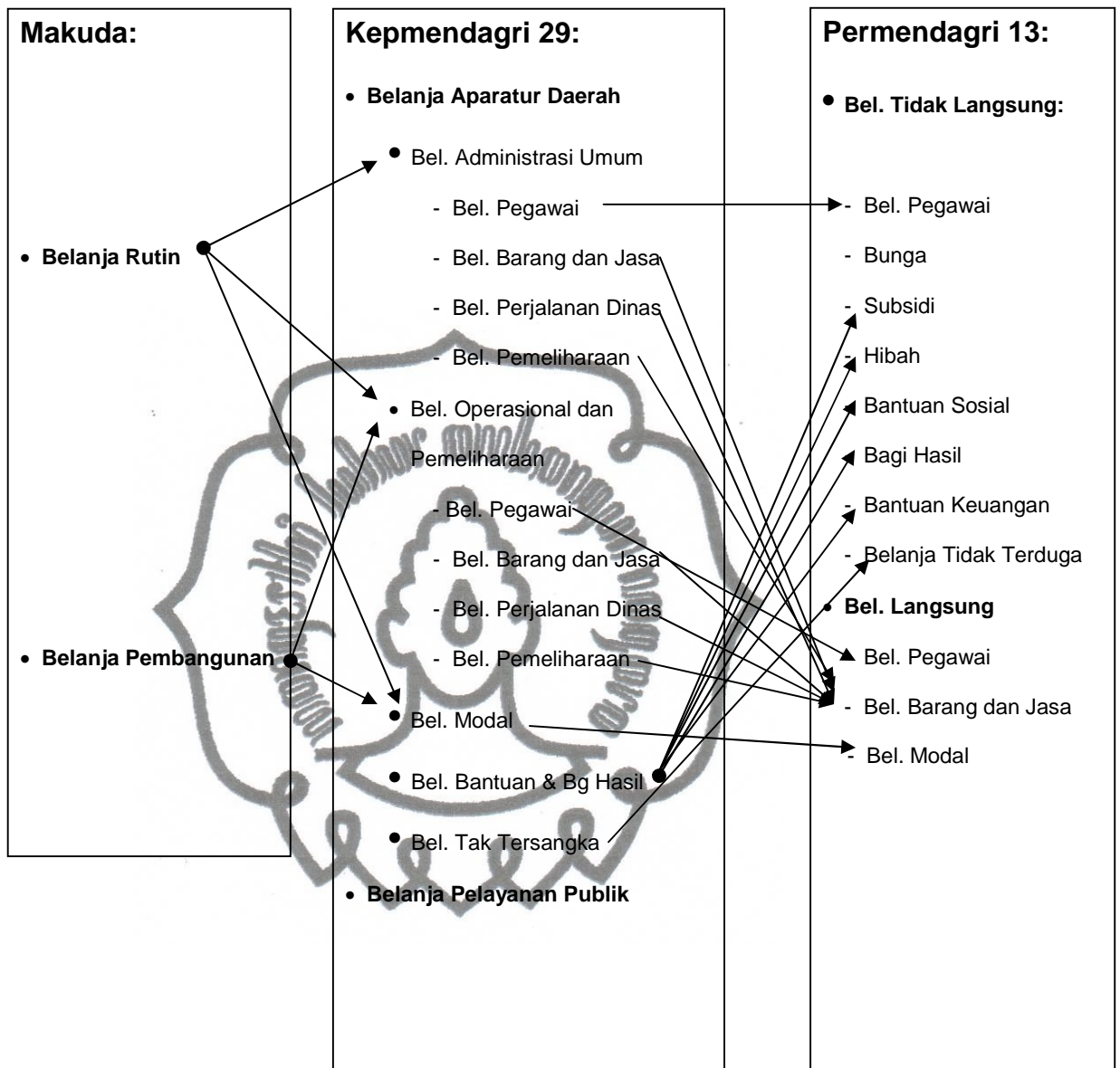
(8) Belanja lain-lain/tak terduga

Belanja tidak terduga merupakan belanja kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup yang tentunya harus disertai bukti-bukti yang sah. Kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu untuk tanggap darurat dalam rangka pencegahan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat daerah.

Tabel 2.3 Perbandingan Struktur Belanja APBD antara Keppmendagri No. 29/2002 dan Permendagri No. 13/2006

Keppmendagri No. 29 Tahun 2002	Permendagri No. 13 Tahun 2006
(1)	(2)
Klasifikasi belanja menurut bidang kewenangan pemerintah daerah, organisasi, kelompok, jenis, obyek, dan rincian obyek belanja	Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, program, kegiatan kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja
Pemisahan secara tegas antara belanja aparatur dan pelayanan publik	Pemisahan kebutuhan belanja antara aparatur dan pelayanan publik tercermin dalam program dan kegiatan
Pengelompokan BAU, BOP, dan NM cenderung menimbulkan terjadinya tumpang tindih penganggaran	Belanja dikelompokkan dalam Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung sehingga mendorong terciptanya efisiensi mulai saat penganggaran
Menggabungkan antara jenis belanja sebagai input dan kegiatan dijadikan sebagai jenis belanja	Restrukturasi jenis-jenis belanja

Sumber : Diolah dari Keppmendagri No. 29 Tahun 2002 dan Permendagri No 13 Tahun 2006



Gambar 2.1 Konversi Belanja Daerah antara Makuda, Kepmendagri 29/2002 dan Permendagri 13/2006

Sumber : Local Government Support Program (LGSP), 2006, Lokakarya Seri B Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja, 25.

3. Pertumbuhan Ekonomi

a. Konsep dan Pengertian

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang sangat penting dalam melakukan analisis pembangunan ekonomi pada suatu negara. Pertumbuhan ekonomi didefinisikan secara singkat adalah sebuah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dan terlihat adanya aspek dinamis dalam suatu perekonomian, yaitu terlihat bagaimana perekonomian suatu negara yang berkembang atau berubah dari waktu ke waktu (Boediono, 1981: 9). Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila dalam jangka waktu yang cukup panjang mengalami kenaikan output per kapita. Sebaliknya jika selama jangka waktu yang cukup panjang tersebut, output per kapita menunjukkan kecenderungan yang semakin menurun, maka penurunan ini bukan pertumbuhan ekonomi.

Menurut Todaro (2003: 144), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang dan jasa ekonomi kepada penduduknya. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Karena penduduk dan kebutuhan ekonomi semakin bertambah, maka penambahan pendapatan sangat dibutuhkan setiap tahunnya. Hal ini hanya bisa didapat lewat peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau

Produk Domestik Bruto (PDB) setiap tahun. Jadi dalam pengertian ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti juga penambahan pendapatan nasional (Tambunan, 2001:3).

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Para ahli ekonomi dan politisi semua negara, baik itu negara kaya maupun miskin yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran menganggap bahwa konsep pertumbuhan ekonomi adalah merupakan tolok ukur penilaian pertumbuhan suatu negara.

Profesor Simon Kuznets memberikan definisi yang cukup rinci mengenai pertumbuhan ekonomi suatu negara. Menurut Kuznets (1971) "pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya" (Todaro dan Smith, 2003: 130). Kenaikan kapasitas itu sendiri atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan) dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

b. Pertumbuhan Ekonomi Daerah

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) didefinisikan sebagai jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan

jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah dalam periode waktu tertentu.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun tertentu sebagai dasar, dimana dalam perhitungan ini digunakan tahun dasar 2000.

PDRB atas dasar harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi dari tahun ke tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ketahun. Pertumbuhan PDRB yang positif dari tahun ke tahun menjadi indikator laju pertumbuhan ekonomi. Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui 3 (tiga) pendekatan (BPS, 2011: 2-3) yaitu : pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran, yang selanjutnya dijelaskan sebagai berikut :

1) Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan produksi, PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya, dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) sektor atau lapangan usaha, yaitu : Pertanian,

commit to user

Pertambangan dan Penggalian, Industri pengolahan, Listrik, Gas dan Air Bersih, Bangunan, Perdagangan, Hotel dan Restoran, Pengangkutan dan komunikasi, Jasa Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan, Jasa- jasa.

2) Pendekatan Pengeluaran

Menurut pendekatan pengeluaran, PDRB adalah penjumlahan semua komponen permintaan akhir, yaitu:

- a). Pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung.
- b). Konsumsi pemerintah.
- c). Pembentukan modal tetap domestik bruto.
- d). Perubahan stok.
- e). Ekspor netto, dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Ekspor netto adalah ekspor dikurangi impor.

3) Pendekatan Pendapatan

Menurut pendekatan pendapatan, PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah di dalam jangka waktu tertentu (satu tahun). Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya.

c. Faktor Penentu Pertumbuhan Ekonomi

Tiga faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi suatu masyarakat yaitu: akumulasi modal yang meliputi semua jenis investasi, pertumbuhan penduduk yang selanjutnya memperbanyak jumlah tenaga kerja, dan kemajuan teknologi (Lincoln Arsyad, 1992: 162). Akumulasi modal negara dapat digunakan untuk pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan dan sekaligus sebagai tabungan negara tersebut. Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat.

Masalah pertumbuhan Ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Dari satu periode ke periode lainya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat. Kemampuan yang meningkat ini disebabkan karena faktor-faktor produksi akan selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Investasi akan menambah jumlah barang modal. Teknologi yang digunakan berkembang. Disamping itu tenaga kerja bertambah sebagai akibat perkembangan penduduk dan pengalaman kerja dan pendidikan menambah ketrampilan (Sukirno, 2000, :10)

Para ahli ekonomi dan politisi semua negara, baik itu negara kaya maupun miskin yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun

campuran menganggap bahwa konsep pertumbuhan ekonomi adalah merupakan tolok ukur penilaian pertumbuhan suatu negara. Ada tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap bangsa yaitu : akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia, pertumbuhan penduduk yang diharapkan akan memperbanyak angkatan kerja sebagai salah satu faktor produksi, dan kemajuan teknologi.

Akumulasi modal (*capital accumulation*) terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan kembali dengan tujuan memperbesar *output* dan pendapatan di kemudian hari. Pengadaan pabrik baru, mesin-mesin, peralatan maupun bahan baku dapat meningkatkan stok modal (*capital stock*) secara fisik suatu negara (yaitu nilai riil atas seluruh barang modal produktif secara fisik) dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan *output* di masa mendatang.

B. Hasil/Studi Penelitian Terdahulu

Isdijoso dan Wibowo (2002) melakukan penelitian Analisis Kebijakan Fiskal pada Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Sektor Pendidikan Kota Surakarta) dengan metode deskriptif komparatif. Hasil studi lapang pada lokus penelitian diperoleh gambaran bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2001 yang merupakan penyangga utama pembiayaan APBD sebagian besar terserap untuk membiayai belanja rutin, terutama belanja pegawai akibat

commit to user

adanya pengalihan Personil, Peralatan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) dari instansi vertikal kepada pemerintah daerah, sehingga pengeluaran rutin untuk belanja pegawai dan belanja non pegawai menjadi membengkak.

Hal ini membawa dampak pada bergesernya alokasi anggaran pembangunan, tidak terkecuali anggaran sektor pendidikan, untuk memenuhi kebutuhan belanja rutin.

Sutriono dan Alfirman (2007) melakukan penelitian Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dan Produk Domestik Bruto dengan Menggunakan Pendekatan Granger Causality dan Vector Autoregression. Penelitian ini berusaha mengetahui adanya hubungan timbal balik antara pengeluaran pemerintah dan produk domestik bruto di Indonesia periode 1970-2003. Metode yang dipakai adalah Granger Causality dan Vector Autoregression (VAR) dengan memperlakukan kedua variabel sebagai variabel endogen. Hasil penelitian menyebutkan terdapat hubungan kausalitas antara total pengeluaran pemerintah dengan produk domestik bruto. Pengeluaran rutin tidak signifikan mempengaruhi produk domestik bruto karena lebih bersifat konsumtif dan tidak produktif serta sebagian besar bersifat kontraktif seperti belanja untuk pembayaran bunga utang. Sementara pengeluaran pembangunan memiliki hubungan kausalitas positif dan signifikan terhadap produk domestik bruto. Hal ini dapat dijelaskan oleh pengaruh positif pengeluaran sektor pertanian, infrastruktur dan transportasi serta pendidikan terhadap produk domestik bruto dan pengaruh positif

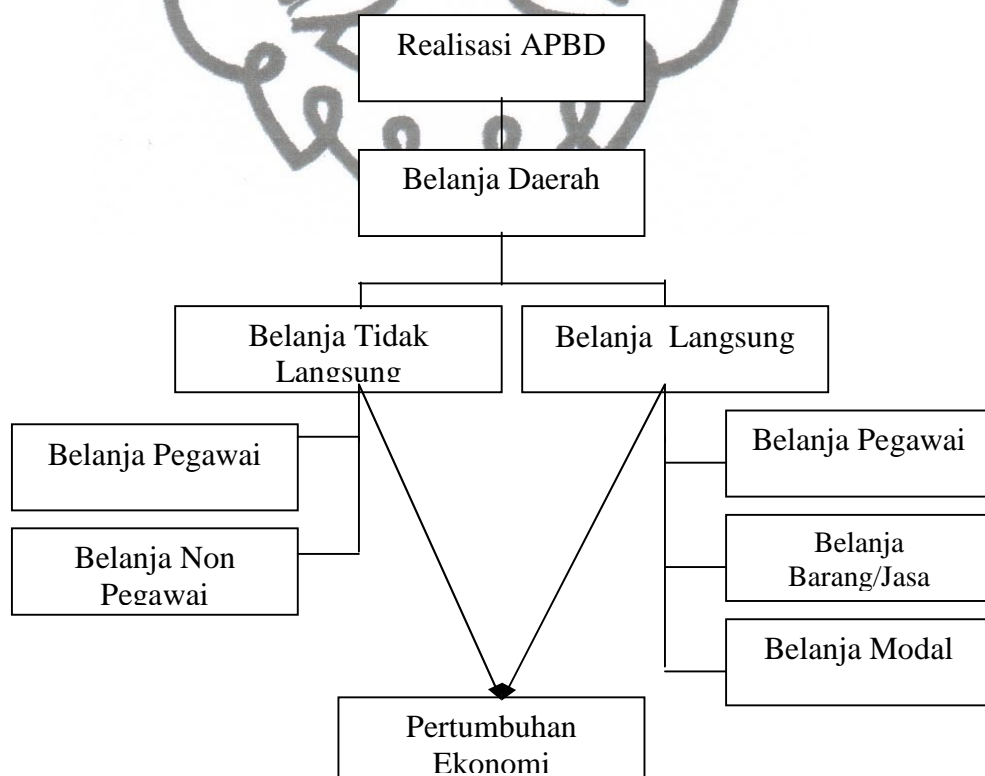
perubahan produk domestik bruto terhadap pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dan transportasi.

Nugroho, Irzan, Chalamza, Juwarta, dan Wijaya (2010) melakukan penelitian Hubungan Pola Belanja dengan PDRB dengan pendekatan korelasi antara variabel belanja langsung, belanja tidak langsung dan PDRB, dengan hasil bahwa pengaruh Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung hanya 52%-54 % saja, artinya tidak ada pengaruh signifikan Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung terhadap PDRB dan ada faktor-faktor lain yang tidak terdeteksi sebesar 46-48 % yang mempengaruhi tinggi/rendahnya PDRB.

Sidikoro (2010) melakukan penelitian tentang Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Timur Tahun 2006-2008 menggunakan analisis data panel dengan metode REM, hasil perhitungan ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari hasil regresi diperoleh nilai R^2 sebesar 0,5636. Hal ini berarti sebesar 56,36 % variasi pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Timur dapat dijelaskan oleh dua variabel independennya yakni Belanja Langsung dan variabel Belanja Tidak Langsung sedangkan sisanya sebesar 43,64% dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dijelaskan bahwa dari realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Ngawi, dilihat dari sisi belanja daerah untuk dianalisis pertumbuhannya, kemudian dari kelompok belanja yaitu Belanja Langsung yang meliputi Belanja Pegawai dan Belanja Barang/jasa, dan Belanja Modal; dan Belanja Tidak Langsung yang meliputi : Belanja Pegawai, dan Belanja Non Pegawai yang terdiri dari belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga yang dianalisis proporsinya terhadap total belanja daerah serta diketahui pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010



Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran Studi
commit to user

D. Hipotesis

Hipotesis yang diturunkan dari kerangka konseptual dan rumusan masalah adalah sebagai berikut :

- a. Belanja daerah Kabupaten Ngawi diduga mengalami pertumbuhan yang meningkat selama 2003-2010
- b. Belanja tidak langsung diduga mempunyai proporsi lebih kecil dan sebaliknya belanja langsung mempunyai proporsi lebih besar terhadap belanja daerah Kabupaten Ngawi selama 2003-2010
3. a. Belanja tidak langsung diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi selama 2003-2010.
- b. Belanja langsung diduga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi selama 2003-2010

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bersifat kausal. Penelitian ini digunakan untuk menganalisis perkembangan belanja daerah dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Ngawi

B. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa data runtut waktu antara Tahun 2003-2010 (di era otonomi daerah). Adapun data tersebut adalah :

1. Data Produk Domestik Regional Bruto diperoleh dari Buku Kabupaten Ngawi Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS
2. Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi dari Buku Kabupaten Ngawi Dalam Angka yang diterbitkan oleh BPS

Data disajikan tersebut dalam bentuk data tahunan namun karena dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda yang harus memenuhi syarat jumlah data minimal, sedangkan dalam penelitian ini hanya 8 tahun sehingga memiliki keterbatasan jumlah data, sehingga data tahunan tersebut dirubah menjadi data kwartalan dengan menggunakan metode

interpolasi yang dikembangkan oleh Insukindro dalam Rahayu (2004) dengan rumus sebagai berikut :

$$Q1t = 1/4\{Yt - 4,5/12(Yt-Yt-1)\} \dots\dots\dots (3.1.a)$$

$$Q2t = 1/4\{Yt - 1,5/12(Yt-Yt-1)\} \dots\dots\dots (3.1.b)$$

$$Q3t = 1/4\{Yt + 1,5/12(Yt-Yt-1)\} \dots\dots\dots (3.1.c)$$

$$Q4t = 1/4\{Yt + 4,5/12(Yt-Yt-1)\} \dots\dots\dots (3.1.d)$$

keterangan :

Qkt = data kuartal ke-k tahun t. $k = 1,2,3,4$

Yt = data yang diinterpolasi pada tahun t

$Yt-1$ = data dari tahun sebelumnya

C. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel penelitian ini adalah :

- a. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja tidak langsung meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga yang disusun dalam satuan jutaan rupiah.
- b. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan. Belanja langsung meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal yang disusun dalam satuan jutaan rupiah

- c. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan relatif nilai riil PDRB di Kabupaten Ngawi atas dasar konstan Tahun 2000 dan dinyatakan dalam satuan persen

D. Teknik Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis umum metode diskriptif dan komparatif. Metode ini dimaksudkan untuk melihat gambaran belanja daerah dari Tahun 2003 sampai dengan 2010. Alat analisis yang dipakai adalah prosentase, tabulasi, dan grafis. Sedangkan terhadap data yang bersifat kuantitatif, alat analisis yang digunakan adalah sebagai berikut :

- a. Analisis Pertumbuhan bertujuan untuk mengetahui trend perkembangan belanja daerah di Kabupaten Ngawi dalam masa periode waktu tertentu. Adapun rumus analisis pertumbuhan yang digunakan adalah sebagai berikut (Widodo,1990:36) :

$$\Delta X = \frac{X_t - X_{(t-1)}}{X_{(t-1)}} \times 100 \% \dots\dots\dots (3.2)$$

Di mana :

- ΔX = Pertumbuhan belanja daerah
 X_t = Belanja Daerah tahun/periode t
 $X_{(t-1)}$ = Belanja Daerah tahun sebelumnya

- b. Analisis Kontribusi/ peranan /proporsi belanja bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pos belanja tertentu terhadap total belanja daerah yang dapat digunakan sebagai dasar mengarahkan, mengalokasikan dan mengendalikan belanja daerah. Untuk melihat peranan belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap belanja daerah dapat dianalisis dengan melihat proporsi dari belanja tersebut, yaitu dengan menggunakan rumus (Widodo, 1990:21) :

$$\text{Proporsi } X_i = \frac{\sum X_i}{\sum \text{Belanja Daerah}} \times 100 \% \dots\dots\dots (3.3)$$

Di mana : $i = 1,2$

$i = 1$ adalah Belanja Tidak Langsung

$i = 2$ adalah Belanja Langsung

3. Analisis Regresi Linier Berganda untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi dengan menggunakan model persamaan sebagai berikut model ekonometrika (Gujarati, 2003) :

$$PEK_t = \alpha_0 + \alpha_1 BTL_t + \alpha_2 BL_t + e \dots\dots\dots (3.4)$$

Dimana :

PEK = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

BL = Belanja Langsung

BTL = Belanja Tidak langsung

e = error

commit to user

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikoloniaritas, dan heterokedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik, yang terdiri dari:

a. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2002). Uji multikolonieritas ini digunakan karena pada analisis regresi terdapat asumsi yang mengisyaratkan bahwa variabel independen harus terbebas dari multikolonieritas atau tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Cara untuk mengetahui apakah terjadi multikolonieritas atau tidak yaitu dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregresi terhadap variabel independen lainnya. Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai Tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF tinggi (karena $VIF = 1/Tolerance$).

Nilai *cutoff* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai Tolerance 0,10 atau sama dengan nilai $VIF > 10$ (Ghozali, 2002).

b. Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lain. Autokorelasi dalam penelitian ini menggunakan uji statistik Durbin Watson. Menurut Ghozali (2002), untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi bisa menggunakan Uji Durbin-Watson (DW test).

Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi :

- 1) Bila nilai DW terletak antara batas atas atau upper bound (du) dan ($4-du$), maka koefisien autokorelasi sama dengan nol, berarti tidak ada autokorelasi
- 2) Bila nilai DW lebih rendah daripada batas bawah atau lower bound (dl), maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, berarti ada autokorelasi
- 3) Bila nilai DW lebih besar daripada ($4-dl$), maka koefisien autokorelasi lebih kecil dari nol, berarti ada autokorelasi negatif

- 4) Bila nilai DW terletak di antara batas atas (d_u) dan batas bawah (d_l) atau DW terletak diantara $(4-d_u)$ dan $(4-d_l)$, maka hasilnya tidak dapat disimpulkan.

c. Uji Heterokedastisitas

Pengujian Heterokedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain, jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heterokedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heterokedastisitas. Untuk mendeteksi ada tidaknya heterokedastisitas dalam penelitian ini dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat dengan residualnya. Deteksi ada tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual. Dasar analisisnya jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heterokedastisitas, dan jika tidak ada pola yang jelas, srta titik-titik menyebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. (Ghozali, 2002).

Selanjutnya setelah dilakukan uji asumsi klasik maka dilakukan uji statistik sebagai berikut :

a. Uji Signifikansi F (F test)

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel bebas/independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terikat/dependen (Ghozali, 2002). Untuk menguji hipotesis digunakan F dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) *Quick Look* : bila nilai $F > 4$ maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%.
- 2) Membandingkan nilai F hasil hitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila F hasil perhitungan $> F$ tabel , maka H_0 ditolak dan menerima H_a

Langkah-langkah pengujian :

- 1) Menentukan H_0 dan h_a

$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen

$H_a : \beta_1 = \beta_2 \neq 0$, terdapat pengaruh yang signifikan secara bersama-sama variabel independen terhadap variabel dependen

- 2) Penentuan level of signifikan ($\alpha = 0,05$)

- 3) Kriteria pengujian

H_0 ditolak apabila signifikansi $\leq \alpha$

H_0 diterima apabila signifikansi $> \alpha$

commit to user

4) Nilai F hitung

$$F \text{ hitung} = \frac{SSR/k}{SSE/n - 1 - k}$$

Keterangan

SSR = Sum of Squares Regression

SSE = Sum of Squares Residual

k = Banyaknya Variabel bebas

n = Banyaknya sampel

b. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien ini digunakan untuk mengukur besarnya kontribusi variasi X_n terhadap variabel Y, dan juga untuk mengetahui ketepatan pendekatan atas alat analisis (Ghozali, 2002). Adapun tingkat ketepatan regresi ditunjukkan oleh R^2 yang besarnya berkisar antara $0 \leq R^2 \leq 1$. makin besar nilai R^2 berarti makin tepat suatu garis regresi linier yang digunakan sebagai pendekatan. Apabila nilai R^2 sama dengan 1 maka pendekatan itu benar-benar sempurna (Ghozali, 2002)

c. Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh secara individual variabel independen terhadap variabel dependen Ghozali (2002). Untuk menguji hipotesis digunakan uji t dengan kriteria sebagai berikut :

- 1) *Quick Look* : Bila jumlah degree of freedom adalah 20 atau lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka H_0 yang menyatakan dapat ditolak bila nilai t lebih besar dari 2.

- 2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut tabel.
Apabila nilai t hasil perhitungan lebih tinggi dibandingkan nilai t tabel.

Langkah langkah pengujian :

- 1) Menentukan Ho dan Ha

Ho : $\beta = 0$, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara individual variabel independen terhadap variabel dependen

Ha : $\beta \neq 0$, terdapat pengaruh yang signifikan secara individual variabel independen terhadap variabel dependen

- 2) Penentuan level of signifikan ($\alpha = 0,05$ atau $\alpha = 0,1$)

Nilai t tabel = t $\alpha/2$ dengan $\alpha = 0,05$ adalah 1,96 dan $\alpha = 0,10$ adalah 1,64

- 3) Kriteria pengujian

Ho diterima apabila signifikansi $> \alpha$

Ho diolak apabila signifikansi $< \alpha$

- 4) Nilai t hitung

$$T \text{ hitung} = \frac{b - \beta}{Sb}$$

Keterangan :

b = Koefisien regresi

β = Nilai nol

Sb = *Standard error of regression coefficient*

commit to user

BAB IV

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

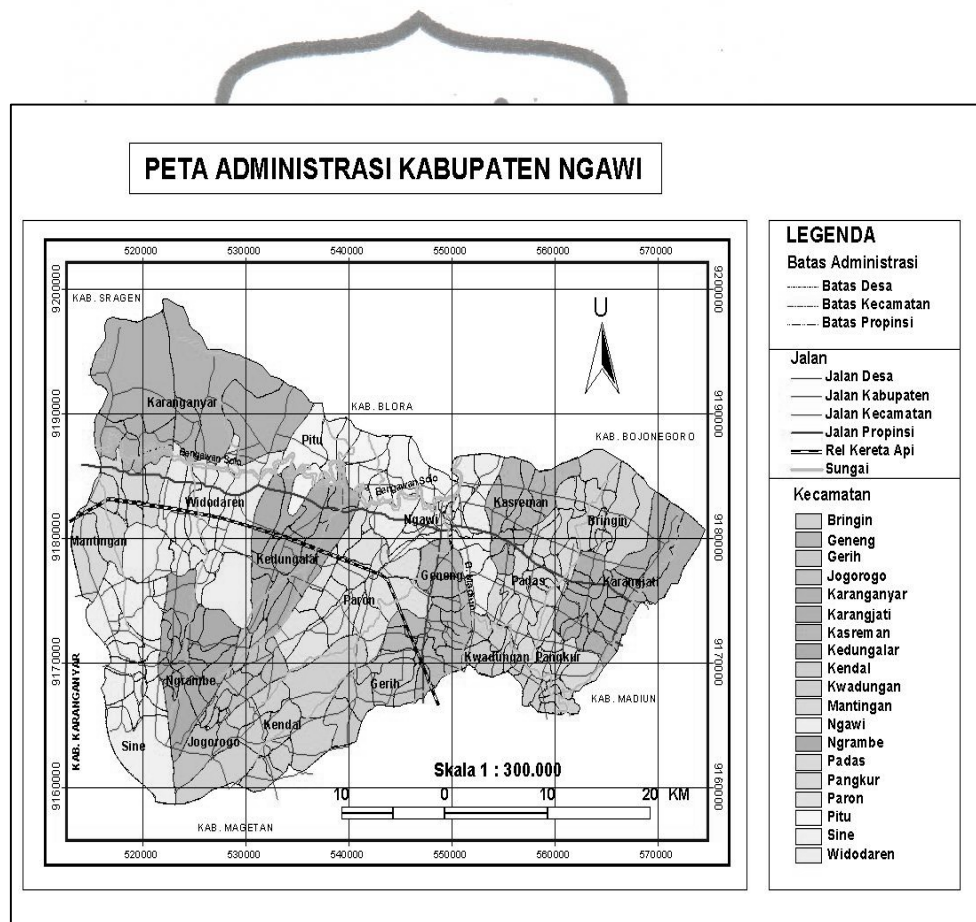
A. Deskripsi Kabupaten Ngawi

1. Keadaan Geografis

Kabupaten Ngawi secara geografis berada di Provinsi Jawa Timur bagian barat, merupakan daerah penghubung Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi adalah 1.298,58 km². Secara administratif pemerintahan terbagi kedalam : 19 kecamatan, 4 kelurahan, dan 213 desa. Secara astronomis Kabupaten Ngawi terletak pada posisi 7^o21' – 7^o31' Lintang Selatan dan 110^o10' – 111^o40' Bujur Timur dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara : Kabupaten Blora, Kabupaten Grobogan (Provinsi Jawa Tengah), Kabupaten Blora (Provinsi Jawa Tengah), dan Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur);
- b. Sebelah barat : Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sragen (Provinsi Jawa Tengah);
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Magetan dan Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur);
- d. Sebelah timur : Kabupaten Madiun (Provinsi Jawa Timur).

Kondisi topografi wilayah cukup bervariasi, yaitu topografi datar, bergelombang, berbukit dan bahkan pegunungan tinggi, dengan ketinggian 40 meter hingga 3.031 meter di atas permukaan air laut. Tercatat 4 kecamatan terletak di dataran tinggi yaitu Kecamatan Sine, Kecamatan Ngrambe, Kecamatan Jogorogo dan Kecamatan Kendal.



Gambar 4.1 Peta Wilayah Kabupaten Ngawi

Sumber : BPS, 2010, Kabupaten Ngawi Dalam Angka 2010

2. Kondisi Pemerintahan Daerah

a. Sumber Daya Manusia dan Aparatur

Sumber daya manusia Pegawai Negeri Sipil, untuk memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat, juga direkrut SDM aparatur yang bersifat honorer (non PNS), yang meliputi Guru Tidak Tetap (GTT) sebanyak 2.549 orang, Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 1.253 orang, dan Tenaga Kontrak sebanyak 1913 orang, sehingga jumlah keseluruhan SDM aparatur honorer mencapai 5.715 orang. Namun pada tahun 2007 sampai tahun 2009 secara berangsur-angsur para tenaga honorer di Kabupaten Ngawi akan diangkat menjadi PNS. Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi memiliki 64 kantor/instansi/bagian yang tersebar di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Ngawi, kecamatan dan desa/kelurahan. Total Pegawai Negeri Sipil pada instansi di lingkup pemerintah Kabupaten Ngawi tersebut yaitu 14.363 orang Tahun 2010, naik 3,88 % dibanding Tahun 2009

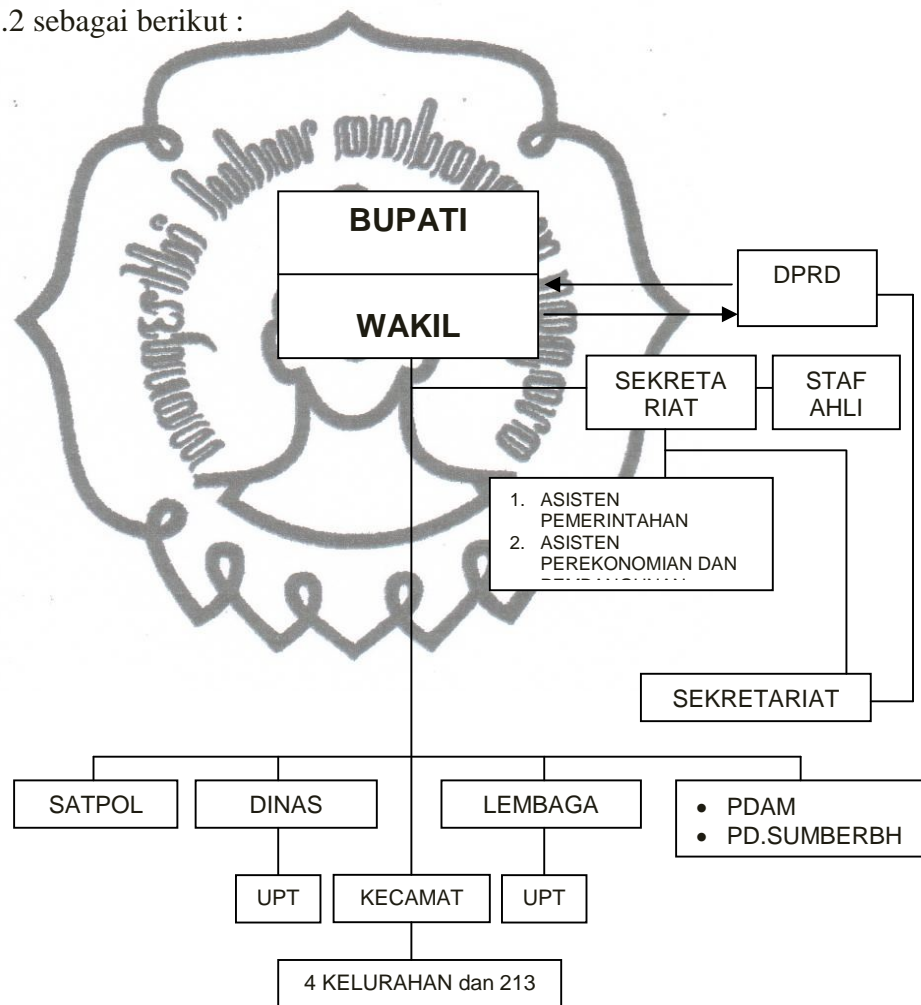
Tabel 4.1 Perkembangan Jumlah PNS menurut Pendidikan Tahun 2007-2010

Rincian	2007	2008	2009	2010
a. SLTP atau kurang	828	1.054	1.177	1.137
b. Sekolah Lanjutan Atas	3.459	3.882	4.892	5.090
c. Sarjana Muda/Diploma	3.061	3.328	3.474	3.350
d. Sarjana/S1	3.230	3.666	4.110	4.587
e. Pasca Sarjana/S2	161	147	174	199
Jumlah	10.739	12.077	13.827	14.363

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka

b. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi

Berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah, Bagan struktur organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi saat ini dapat dilihat pada gambar 4.2 sebagai berikut :



Gambar 4.2 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2010

Sumber : Bagian Organisasi Setda Kab. Ngawi 2010

c. Visi dan Misi Kabupaten Ngawi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dokumen perencanaan pembangunan daerah yang harus disusun oleh Pemerintah Kabupaten adalah :

- 1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 20 tahun,
- 2) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun,
- 3) Rencana Pembangunan Tahunan Daerah atau Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun.

Berdasarkan dokumen perencanaan pembangunan daerah tersebut, masing-masing satuan kerja perangkat daerah harus menyusun dokumen perencanaan pembangunan :

- 1) Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD), memiliki jangka waktu perencanaan 5 tahun sebagai penjabaran dari RPJMD,
- 2) Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD), memiliki jangka waktu perencanaan 1 tahun sebagai penjabaran dari Renstra SKPD dan RKPD.

Kabupaten Ngawi diarahkan menjadi Kabupaten yang unggul di bidang agraris yang dalam melaksanakan kegiatan *commit to user* pembangunannya agar lebih terarah, efektif dan efisien, semua kegiatan

pembangunan harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2006 – 2010 yang didalamnya memuat Visi dan Misi Kabupaten Ngawi yang secara substansial memuat kebijakan, sasaran dan program lima tahunan di daerah. Dalam rangka mencapai visi dan misi tersebut, prioritas pembangunan diarahkan pada pengentasan kemiskinan dan kesenjangan, pembangunan pertanian, kehutanan, sosial ekonomi, pendidikan, kesehatan, prasarana dan sarana wilayah, penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan beragama.

Visi Kabupaten Ngawi adalah "Terwujudnya Kabupaten Ngawi yang unggul di bidang agraris untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam suasana agamis". Visi tersebut ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Ngawi Tahun 2006-2010. Untuk mewujudkan visi pembangunan daerah tersebut, maka ditetapkan misi yang merupakan pernyataan penetapan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Ngawi.

Misi tersebut merupakan penjabaran dari visi pembangunan daerah yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh, yaitu:

- 1) Mewujudkan sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang lebih transparan, partisipatif dan akuntabel demi terjamin dan tegaknya supremasi hukum dan hak azasi rakyat.
- 2) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dengan memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan minimal untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- 3) Memberdayakan dan memanfaatkan ketersediaan sumber daya alam dan manusia yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.
- 4) Meningkatkan hubungan antar warga masyarakat yang harmonis untuk mendukung pelaksanaan pembangunan.

3. Indikator Kinerja Pembangunan

a. Kondisi Ekonomi Daerah

1) Produk Domestik Regional Bruto

Berikut ini data untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kegiatan ekonomi dalam suatu wilayah dapat dilihat melalui neraca ekonominya. Salah satu indikator yang digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB Kabupaten Ngawi merupakan jumlah seluruh nilai tambah dari produk barang dan jasa yang dasar pengukurannya timbul akibat adanya aktivitas ekonomi.

Sampai dengan Tahun 2010 perekonomian Kabupaten Ngawi masih didominasi sektor pertanian. Sumbangan sektor ini terhadap total PDRB sampai dengan Tahun 2008 sekitar 36,9 %. Tidaklah aneh apabila sektor ini menjadi sektor unggulan bagi Kabupaten Ngawi. Namun demikian sumbangan sektor ini dari tahun ketahun mengalami penurunan walaupun sebenarnya secara produksi mengalami pertumbuhan. Sektor lainnya yang memberikan sumbangan cukup besar terhadap perekonomian di Kabupaten Ngawi adalah sektor perdagangan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir menyumbangkan lebih dari 25 % dari total PDRB.

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari PDRB merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Angka pertumbuhan menunjukkan kenaikan pertumbuhan barang/jasa terhadap tahun sebelumnya, dengan tidak dipengaruhi variabel harga. Apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi yang besar terhadap totalitas perekonomian, maka apabila sektor tersebut mempunyai pertumbuhan yang tinggi secara langsung akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total.

PDRB menurut lapangan usaha berdasar harga berlaku Tahun 2007 mencapai 4,445 milyar rupiah, naik nsekitar 12,8 % dari tahun 2008 yang mencapai 5,031 milyar rupiah, dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2 PDRB Kabupaten Ngawi menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Berlaku Tahun 2006-2008 (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian	1.629.981,80	1.843.370,50	2.129.128,28
2	Pertambangan & Penggalian	23.924,26	27.821,13	31.159,67
3	Industri Pengolahan	275.496,96	306.568,98	354.275,13
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	31.946,84	36.199,99	44.111,18
5	Konstruksi	202.821,88	243.130,70	276.908,89
6	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.241.254,87	1.412.591,98	1.610.680,64
7	Pengangkutan & Komunikasi	181.477,29	205.072,67	233.711,75
8	Keuangan, Persewaan & Jasa perusahaan	218.291,53	243.939,08	273.336,32
9	Jasa –jasa	640.359,59	712.733,97	816.961,22
P D R B		5.031.428,99	4.445.555,03	5.031.428,99

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010

PDRB menurut lapangan usaha berdasarkan harga konstan Tahun 2000 juga menunjukkan perkembangan. Tahun 2006 PDRB menurut harga konstan Tahun 2000 sebesar Rp. 2.510.075,52 juta, meningkat menjadi sebesar Rp. 2.639.717,89 juta pada tahun 2007 dan meningkat lagi menjadi sebesar Rp. 2.785.335,43 juta pada Tahun 2008. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut ini :

Tabel 4.3 PDRB Kabupaten Ngawi menurut Lapangan Usaha atas dasar Harga Konstan (2000) Tahun 2006-2008 (juta rupiah)

No	Lapangan Usaha	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertanian	941.025,88	985.007,46	1.039.356,65
2	Pertambangan & penggalian	14.403,57	15.442,31	16.286,80
3	Industri pengolahan	155.405,22	162.859,61	173.860,51
4	Listrik, gas & air bersih	13.730,36	14.673,00	16.013,48
5	Konstruksi	110.420,20	116.758,32	120.634,70
6	Perdagangan, hotel & restoran	697.427,05	745.925,20	793.681,83
7	Pengangkutan & komunikasi	87.412,59	92.497,17	98.137,08
8	Keuangan, persewaan & jasa perusahaan	137.199,62	142.016,95	148.281,52
9	Jasa-jasa	353.051,03	364.537,86	379.082,87
PDRB		2.510.075,52	2.639.717,89	2.785.335,43

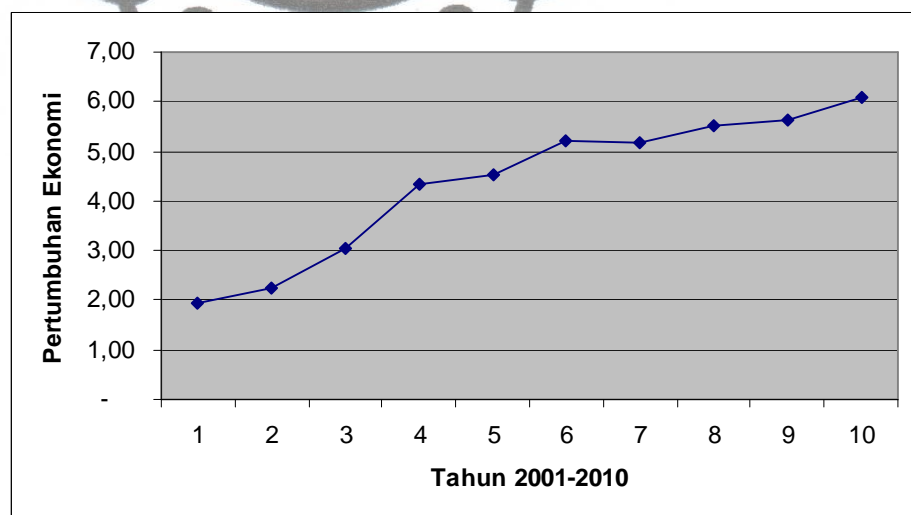
Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010

2) **Pertumbuhan Ekonomi**

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di tingkat provinsi pula, perekonomian di Kabupaten Ngawi menunjukkan stabilitas yang signifikan. Indikator perekonomian daerah Kabupaten Ngawi dapat dilihat dari kontribusi masing-masing sektor perekonomian, yang meliputi 9 (sembilan) sektor/lapangan usaha, dengan komposisi pertumbuhan yang dituangkan dalam nominal dari tahun ke tahun. Indikator dari sektor pertanian dalam jumlah satuan rupiah merupakan sektor yang paling dominan serta mengalami peningkatan, akan tetapi apabila dikaji terhadap harga berlaku dan harga konstan sektor ini mengalami stagnasi, hal ini perlu disikapi dengan mengupayakan peningkatan pada sektor-sektor dominan.

Data PDRB yang dipergunakan atas dasar harga konstan 2000. penggunaan harga konstan dimaksudkan agar dapat diperoleh suatu nilai yang bebas dari inflasi sehingga sifatnya riil. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi mengalami pertumbuhan positif dari tahun ke tahun. Laju pertumbuhan tertinggi berdasarkan harga berlaku terjadi pada Tahun 2010 sebesar 6,09 %. Dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi setiap tahunnya hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mampu berkontribusi positif dalam peningkatan kesempatan kerja, kesejahteraan masyarakat dan pendapatan yang diterima masyarakat.

Tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan yang dihitung dari PDRB merupakan rata-rata tertimbang dari tingkat pertumbuhan sektoralnya. Angka pertumbuhan menunjukkan kenaikan pertumbuhan barang/jasa terhadap tahun sebelumnya, dengan tidak dipengaruhi variabel harga. Apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi besar dan pertumbuhannya lambat, maka hal ini akan menghambat tingkat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Sebaliknya apabila sebuah sektor mempunyai kontribusi yang besar terhadap totalitas perekonomian, maka apabila sektor tersebut mempunyai pertumbuhan yang tinggi secara langsung akan menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi secara total.



Gambar 4. 3 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi

Tabel 4.4 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi Tahun 2001-2010

TAHUN	Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	PDRB (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2001	2.076.059,57	1,93
2002	2.122.888,83	2,26
2003	2.187.262,88	3,03
2004	2.282.391,93	4,35
2005	2.385.681,99	4,53
2006	2.510.075,52	5,21
2007	2.639.717,89	5,16
2008	2.785.331,43	5,52
2009	2.942.602,52	5,65
2010	3.121.821,49	6,09

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka diolah

3) Pendapatan Regional Perkapita

Menurut perhitungan atas dasar harga berlaku, pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2008 sebesar Rp. 5.966.880,81 atau naik sebesar 1,11% pada Tahun 2009 menjadi Rp. 7.033.529,80. sedangkan pendapatan perkapita atas dasar harga konstan pada Tahun 2008 sebesar Rp. 3.056.652,66 atau naik sebesar 1,05% menjadi Rp. 3.211.416,58 pada Tahun 2009.

4) Keuangan Daerah

Pendapatan daerah Kabupaten Ngawi bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan pendapatan daerah

lain-lain yang sah. Belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Total realisasi penerimaan daerah pada Tahun 2010 sebesar 982.336 milyar rupiah, meningkat sekitar 23,14 % dibanding tahun sebelumnya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2010 hanya menyumbang 35.313 milyar rupiah atau sekitar 3,59 % dari total penerimaan. Dana Alokasi Umum (DAU) masih menjadi penyokong terbesar bagi penerimaan Kabupaten Ngawi.

Pada Tahun 2010 ini Kabupaten Ngawi memperoleh DAU sebesar 654.720 milyar rupiah atau sekitar 66,65 % dari total penerimaan daerah. Total realisasi belanja Kabupaten Ngawi pada tahun 2010 mencapai 1.041.015 milyar rupiah hanya meningkat sekitar 29,5 % dari tahun 2009 yang mencapai 237.341 milyar rupiah. Realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Ngawi tahun 2010 sebesar 10.986 milyar rupiah meningkat 2.082 milyar rupiah atau 23,4 % . seperti dapat dilihat pada Tabel 4.5

Tabel 4.5 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2007-2010

PENDAPATAN DAERAH	2008	2009	2010
(1)	(3)	(4)	(5)
1. PAD	22.863.251,23	25.894.193	35.313.790.550
a. Hasil Pajak Daerah	8.391.451,76	8.794.830	10.717.750.000
b. Hasil Retribusi Daerah	7.999.256,44	10.000.480	17.099.799.000
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yg Dipisahkan	1.246.498,81	1.093.549	1.127.798.050
d. Lain-lain PAD yag Sah	5.226.044,22	6.005.334	6.368.443.500
2. DANA PERIMBANGAN	639.984.673,82	673.613.964	786.098.768.250
a. Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	35.968.218,44	45.204.382	61.608.288.250
	5.728.751,38	2.937.207	-
b. Dana Alokasi Umum	544.877.704,00	555.625.375	654.720.280.000
c. Dana Alokasi Khusus	53.410.000,00	69.847.000	69.770.200.000
3. LAIN PENDAPATAN YG SAH	51.007.405,88	98.237.248	160.923.530.200
a. Pendapatan Hibah	-	15.451.675	1.858.575.000
b. Bagi Hasil Pajak dr prop	25.823.702,94	30.916.383	39.019.230.000
c. Bantuan Keuangan dr Prop	25.183.702,94	12.401.464	14.311.050.000
d. Tambahan Penghan PNS Guru	-	39.467.726	35.500.000.000
e. Tunjangan Profesi Guru PNSD	-	-	70.234.675.200
JUMLAH TOTAL	713.855.330,93	797.745.405	821.412.558.800

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka diolah

b. Kondisi Sosial Budaya

1) Kehidupan Sosial Masyarakat dan Keagamaan

Masyarakat merupakan salah satu faktor yang menentukan dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Bidang sosial merupakan bidang yang terkait langsung dengan masyarakat sebagai pelaku dan penikmat

pembangunan. Komposisi dan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bervariasi merupakan pencerminan secara khusus dalam pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan konteks sosial kemasyarakatan, secara kuantitatif penduduk Kabupaten Ngawi mayoritas adalah pemeluk agama Islam (lebih dari 95%). Secara umum pemeluk Islam tersebut mayoritas memiliki kedekatan hubungan kultural dengan organisasi masyarakat (ormas) Nahdhatul Ulama. Hal tersebut dalam kenyataan sehari-hari cukup memberi pengaruh bagi interaksi antar penduduk dan antar kelompok masyarakat.

Secara umum, interaksi antar warga masyarakat sehari-hari relatif aman dan damai, jika terdapat benturan-benturan kecil antar warga masyarakat dapat diselesaikan secara musyawarah tanpa memperkeruh suasana. Kiranya hanya pada saat tumbangnya Orde Baru (tahun 1998-1999), sebagaimana kondisi berbagai wilayah Indonesia lainnya, terjadi gesekan antar kelompok yang cukup berarti dalam kehidupan sehari-hari, namun kini hal tersebut telah berlalu. Bahkan hikmah dari gesekan tersebut adalah terdapatnya warisan positif berupa tumbuh-kembangnya berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sejenisnya yang cukup memberi warna baru dalam dinamika kehidupan sosial di Kabupaten Ngawi.

Jumlah penduduk Kabupaten Ngawi akhir Tahun 2009 adalah 892.051 jiwa, terdiri dari 438.223 jiwa penduduk laki-laki

dan 453.828 jiwa penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin/*sex ratio* sebesar 96. artinya bahwa setiap 100 penduduk wanita terdapat sekitar 96 penduduk laki-laki. Akan tetapi, bila dibandingkan dengan tahun 2008 jumlah penduduk Kabupaten Ngawi bertambah sebesar 2.827 jiwa atau meningkat 0,32 persen selama setahun, seperti dapat dilihat pada Tabel 4.6 di bawah ini :

Tabel 4.6 Jumlah Penduduk Kabupaten Ngawi menurut Jenis Kelamin Tahun 2009

No	Nama Kecamatan	Penduduk		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Sine	22.601	25.580	48.181
2	Ngrambe	21.163	21.412	45.575
3	Jogorogo	20.176	21.183	41.359
4	Kendal	24.413	26.419	50.832
5	Geneng	27.717	28.118	55.835
6	Gerih	18.184	19.289	37.473
7	Kwadungan	14.199	14.483	28.682
8	Pangkur	13.996	14.631	28.627
9	Karangjati	23.211	24.825	48.036
10	Bringin	15.890	16.344	32.234
11	Padas	16.911	16.949	33.860
12	Kasreman	12.013	12.006	24.019
13	Ngawi	41.930	42.432	84.362
14	Paron	44.066	45.300	89.366
15	Kedunggalar	36.901	37.212	74.113
16	Pitu	14.060	14.180	28.240
17	Widodaren	35.095	35.788	70.883
18	Mantingan	19.855	22.023	41.878
19	Karanganyar	15.842	15.654	31.496
Jumlah		438.223	453.828	892.051

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010

Kepadatan penduduk menunjukkan rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah. Tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Ngawi tahun 2009 adalah 688 jiwa/Km², naik sekitar 5

jiwa untuk setiap kilometer persegi dari tahun sebelumnya. Tingkat kepadatan per kecamatan tertinggi di Kecamatan Ngawi (1.196 jiwa/Km²) dan tingkat kepadatan terendah adalah Kecamatan Karanganyar (228 jiwa/Km²). Hal ini dapat dilihat secara rinci pada Tabel 4.7 di bawah ini :

Tabel 4.7 Tingkat Kepadatan Penduduk Kabupaten Ngawi Tahun 2009

No	Nama Kecamatan	Luas Daerah (Km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (jiwa/Km ²)
1	Sine	80,22	48.181	601
2	Ngrambe	57,49	45.575	741
3	Jogorogo	65,84	41.359	628
4	Kendal	84,56	50.832	601
5	Geneng	52,52	55.835	1063
6	Gerih	34,52	37.473	1086
7	Kwadungan	30,30	28.682	947
8	Pangkur	29,41	28.627	973
9	Karangjati	66,67	48.036	721
10	Bringin	62,62	32.234	515
11	Padas	50,22	33.860	674
12	Kasreman	31,49	24.019	763
13	Ngawi	70,56	84.362	1196
14	Paron	101,14	89.366	884
15	Kedunggalar	129,65	74.113	572
16	Pitu	56,01	28.240	504
17	Widodaren	92,26	70.883	768
18	Mantingan	62,21	41.878	673
19	Karanganyar	138,29	31.496	228
Jumlah		1.295,98	892,051	688

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2010

Kualitas sumber daya manusia Kabupaten Ngawi secara kasar dapat dilihat pada tingkat pendidikan penduduknya. Berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional Tahun 2001

jumlah penduduk Kabupaten Ngawi usia 10 (sepuluh) tahun ke atas yang hanya tamat SD=346.536 jiwa (62%), hanya tamat SLTP=113.839 jiwa (20%), hanya tamat SLTA=84.498 jiwa (15%) dan tamat akademi/perguruan tinggi= 17.969 jiwa (3%). Jika pendidikan dasar yang dicanangkan pemerintah mencakup tingkat pendidikan SD sederajat dan SMP sederajat maka terdapat sekitar 82% yang berkualifikasi pendidikan dasar. Hal tersebut menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat pendidikannya, kualitas sumber daya manusia Kabupaten Ngawi masih kurang memadai.

Di lain pihak, menurut laporan Dinas Transmigrasi, Sosial dan Tenaga Kerja pada tahun 2009 terdapat 27.740 penduduk Kabupaten Ngawi tercatat sebagai pencari kerja (pengangguran terbuka). Sedangkan lowongan kerja yang tersedia sebanyak 2.683 orang dan jumlah penempatan kerja hanya untuk 1.892 orang.

2) IPM

Sejalan dengan hal tersebut, Indikator keberhasilan pembangunan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Dengan tolok ukur tersebut dapat ditetapkan strategi pembangunan tahun 2009 dan mensinergikan seluruh program pembangunan agar tepat sasaran dan memiliki keluaran berfokus kesejahteraan masyarakat. IPM Kabupaten Ngawi mengalami fluktuasi. Pada tahun 1996 IPM Ngawi sebesar 65,00, kemudian menurun sebesar

2,60 % menjadi 58,84 pada tahun 1999, dan pada tahun 2002 kembali naik menjadi 61,42, sedangkan pada tahun 2004 meningkat lagi menjadi 63,99. Mendasar data BPS Propinsi Jawa Timur pada tahun 2009, Angka Harapan Hidup 72,58; rata-rata lama sekolah adalah 6,30; Angka melek huruf 0 dan Paritas daya beli 54,50; dengan keseluruhan Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngawi sebesar 63,59.

3) Tingkat Kemiskinan

Pada Tahun 2005, tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi mencapai 19,52% kemudian pada Tahun 2006 turun menjadi 19,10% sebelum akhirnya naik kembali menjadi 22,51% pada Tahun 2007. Kenaikan harga BBM pada Tahun 2007 secara tajam memberikan dampak negatif khususnya bagi masyarakat yang berada diambang kemiskinan, karena sebagian besar dari mereka menjadi miskin. Tetapi pemerintah telah menantisipasi hal ini dengan program pengentasan kemiskinan diantaranya penyaluran BLT pada rumah tangga miskin, sehingga presentasi penduduk miskin pada Tahun 2008 turun kembali menjadi 19,89%. Pada Tahun 2009 presentase jumlah Rumah Tangga Miskin (RTM) menurut Program Pendataan Perlindungan Sosial (PPLS) Tahun 2008 sejumlah 90.118 RTM ada penurunan dari tahun sebelumnya

sejumlah 90.895 RTM hasil pendataan Sosial Ekonomi (PSE) Tahun 2005.

Berikut ini Tabel 4.8 untuk mengetahui tingkat kesejahteraan sosial di Kabupaten Ngawi pada Tahun 2009 :

Tabel 4.8 Kesejahteraan Sosial Kabupaten Ngawi Tahun 2008-2009

No.	Jenis Data	Satuan	Tahun	
			2008	2009
1.	Penduduk Rawan Sosial dan Sarana	Jiwa	54.341	35.267
	a. Keluarga fakir miskin	Jiwa	66	66
	b. Balita terlantar	Jiwa	10.957	10.958
	c. Anak terlantar	Jiwa	6.051	6.051
	d. Lanjut usia terlantar	Jiwa	17	17
	e. Gelandangan	Jiwa	2.884	2.110
	f. Penyandang cacat	Jiwa		
	g. Korban bencana alam & korban lainnya	Jiwa	452	1028
	h. Pengemis	Jiwa	45	45
2.	Panti Asuhan			
	a. Panti sosial asuhan yatim piatu	Buah	7	7
	b. Panti sosial tresna werda	Buah	1	1
3.	Potensi Kesejahteraan Sosial			
	a. Karang taruna	Buah	217	217
	b. Tenaga kessos masyarakat	Orang	1.168	1.168
	c. Organisasi sosial	Buah	10	10
4.	Penduduk Miskin			
	Jumlah rumah tangga miskin	KK	82.572	82.572

Sumber : Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Ngawi 2010

4) Pelayanan Pendidikan

Pelaksanaan peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang telah dicapai dari Tahun 2005 sampai dengan 2009 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.9 Peningkatan Kualitas Pelayanan Pendidikan Kabupaten Ngawi Tahun 2007-2009

No	Uraian	2007	2008	2009
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka melek huruf	96.62	97.71	97.71
2	Angka Rata2 lama sekolah	7.37	7.76	8.00
3	Angka pendidikan yg ditamatkan	4.59	4.45	3.54
4	Angka partisipasi sekolah	237.07	76.17	278.97
5	PAUD	41.37	42.82	42.26
6	Angka partisipasi Murni SD/MI/Paket A	97.23	98.58	99.34
7	Angka partisipasi Murni SMP	92.83	93.12	93.53
8	Angka partisipasi Murni SMA	65.46	69.14	71.19
9	Angka Putus sekolah SD	0.01	0.01	0.01
10	Angka Putus sekolah SMP	0.04	0.02	0.02
11	Angka Putus sekolah SMA	0.09	0.05	0.02
12	Angka Kelulusan SD	99.78	99.87	99.85
13	Angka Kelulusan SMP	99.90	99.29	99.32
14	Angka Kelulusan SMA	95.09	94.22	98.30
15	Angka melanjut dari SD ke SMP	101.40	108.50	117.30
16	Angka melanjut drSMP ke SMA	64.11	62.71	81.80

Sumber : RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2006-2010

5) Pelayanan Kesehatan

Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan yang telah dicapai dari tahun 2006 sampai dengan 2008, adalah sebagai berikut :

Tabel 4.10 Pelayanan Kesehatan Kabupaten Ngawi Tahun 2006-2008

No	Uraian	2006	2007	2008
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Angka Usia Harapan Hidup	70.8	70.8	70.8
2	Prosentase balita gizi buruk	2.46	0.68	3.9
3	Rasio posyandu per satuan balita	1.148 : 53.921	1.160 : 61.838	1.166 : 911.924
4	Rasio rumah sakit per satuan penduduk	2 : 857.449	2 : 885.363	2 : 911.924
5	Rasio dokter per satuan penduduk	109 : 857.449	103 : 885.363	96 : 911.924
6	Cakupan komplikasi kebidanan	99.89	119.61	72.15
7	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yg memiliki kompetensi	97.09	99.79	78.37
8	Cakupan desa Universal Child Immunization	74.65	68	26.27
9	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100
10	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit TBC BTA	79.17	95	95.74
11	Cakupan penemuan dan penanganan penyakit DBD	100	37	83.55
12	Cakupan Pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	51.44	98.91	100
13	Cakupan kunjungan bayi	100.78	98.83	49.68

Sumber : RPJMD Kabupaten Ngawi Tahun 2006- 2010

commit to user

c. Kondisi Sarana dan Prasarana Wilayah

1) Prasarana Jalan

Panjang jalan kabupaten sampai dengan akhir Tahun 2009 mencapai 597.960 Km, kesemuanya masuk kategori kelas III C. Dari jalan sepanjang tersebut, yang kondisinya baik sepanjang 99.266 Km, kondisi sedang sepanjang 218.756 Km.

Tabel 4.11 Panjang Jalan menurut Jenis, Kondisi dan Kelas Jalan di Kabupaten Ngawi Tahun 2009 (km)

No	Keadaan	Jalan Negara	Jalan Propinsi	Jalan Kabupaten
1.	Jenis Permukaan			
	a. Di Aspal	79,56	-	493,96
	b. Kerikil	-	-	97,52
	c. Tanah	-	-	6,48
	d. Tidak dirinci	-	-	-
	Jumlah	79,56	-	597,96
2.	Kondisi Jalan			
	a. Baik	18,44	-	126,63
	b. Sedang	59,12	-	132,31
	c. Rusak	2,00	-	233,31
	d. Rusak Berat	-	-	105,11
	Jumlah	79,56	-	597,96
3.	Kelas Jalan			
	a. Kelas I	-	-	-
	b. Kelas II	79,56	-	-
	c. Kelas III	-	-	-
	d. Kelas III A	-	-	-
	e. Kelas III B	-	-	-
	f. Kelas IIIC	-	-	597,96
	g. Tidak dirinci	-	-	-
	Jumlah	79,56	-	597,96

Sumber : DPU Bina Marga, Cipta Karya, dan Kebersihan Kab. Ngawi

2) Jembatan

Panjang jembatan sampai dengan tahun 2009 mencapai 2897.35 m (365 jembatan), dengan kondisi sebagai berikut : yang kondisi baik sepanjang 22.74,35 m (320 jembatan), yang kondisi sedang mencapai 458 m (26 jembatan) dan yang kondisinya rusak berat mencapai 165 m (19 jembatan) dan kondisi rusak berat tidak ada.

3) Prasarana Jaringan Irigasi

Secara fungsional jaringan irigasi meliputi 4 (empat) komponen, yaitu : bendungan, saluran pembawa, saluran pembuang dan petak sawah. Pengembangan sistem irigasi primer dan skunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Sedangkan pengembangan sistem irigasi tersier menjadi wewenang dan tanggung jawab Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA). Kondisi jaringan irigasi sampai dengan Tahun 2009 perkembangan jenis, jumlah prasarana irigasi yang diairi dapat dilihat secara terperinci sebagai berikut :

- a) Saluran primer (induk); panjang 21.400 Km, kerusakan 30 %
- b) Saluran sekunder; panjang 322.145 Km, kerusakan 25 %
- c) Bangunan Utama; jumlah 412 buah, kerusakan 31,67 %
- d) Bangunan Pendukung; jumlah 1.001 buah, kerusakan 27,5 %.

B. Analisis Data dan Pembahasan

1. Analisis Pertumbuhan Belanja Daerah

Pertumbuhan belanja daerah dihitung dengan menggunakan rumus (Widodo,1990:36) seperti yang dijelaskan pada Bab III, dengan penghitungan didasarkan pada data belanja daerah dari Tahun 2003 hingga Tahun 2010, maka diperoleh hasil penghitungan seperti pada Tabel 4.12 di bawah ini :

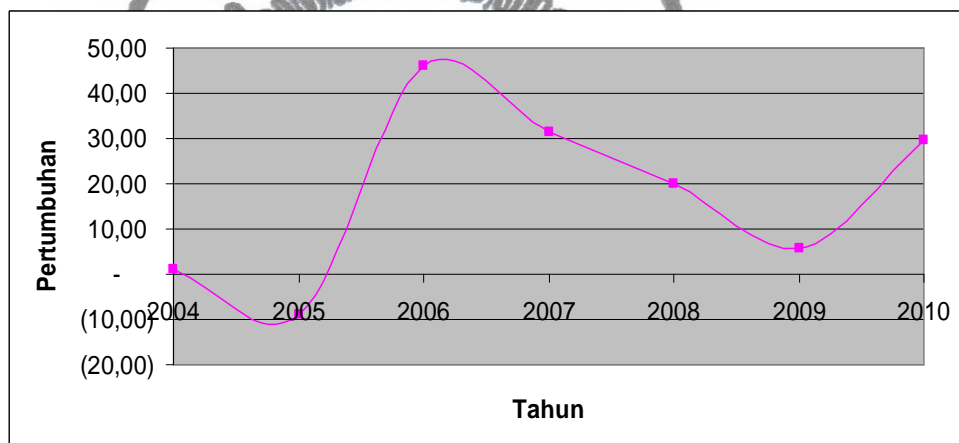
Tabel 4.12 Pertumbuhan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010

Tahun	Belanja Daerah	Pertumbuhan (%)
(1)	(2)	(3)
2003	360.122,90	
2004	363.378,23	0,90
2005	330.736,60	(8,98)
2006	483.383,20	46,15
2007	634.506,00	31,26
2008	760.350,80	19,83
2009	803.674,30	5,70
2010	1.041.015,50	29,53
Rata - rata		17,77

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka diolah

Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Ngawi berkisar antara 0,90% sampai dengan 46,15 % sehingga rata-rata pertumbuhan belanja daerah selama periode Tahun 2003-2010 sebesar 17,17 % dan angka pertumbuhannya fluktuatif dengan pola kecenderungan menurun. Pada Tahun 2005 pertumbuhannya mengalami penurunan sebesar -8,98 % hal ini karena terjadi penurunan belanja modal sebesar -79,3 %, jika di Tahun 2004 APBD Kabupaten Ngawi mengalami defisit sekitar 6,718 milyar di Tahun 2005 mengalami surplus sekitar 36,799 milyar selain itu pendapatan daerah dari PAD pada tahun tersebut juga menurun. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Tahun 2006 sebesar 46,15 % hal ini disebabkan meningkatnya belanja modal sebesar 284,09 % dan belanja barang dan jasa sebesar 117,17 % hal ini disebabkan setelah adanya pilkada dengan terpilihnya kembali pasangan kepala daerah, program-program yang telah dikampanyekan mulai direalisasikan serta peningkatan belanja pegawai sebesar 93,62% karena pada tahun tersebut pemerintah Kabupaten Ngawi mulai mengangkat tenaga honorer menjadi CPNS sehingga menyebabkan peningkatan realisasi belanja daerah. Perkembangan realisasi belanja daerah secara nominal menunjukkan kecenderungan meningkat terutama Tahun 2005 pendapatan daerah Tahun 2006 meningkat hampir 50% dari tahun sebelumnya walaupun peningkatan tersebut berasal dari DAU yang mencapai 82 % dari total penerimaan daerah namun hal ini menunjukkan adanya peningkatan pendapatan daerah walaupun penerimaan daerah dari pajak dan retribusi

daerah relatif masih kecil dalam struktur pendapatan daerah sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat masih besar, tercermin dari porsi dana perimbangan dalam APBD yang jauh lebih besar dibanding PAD, namun dapat mendorong pula terhadap meningkatnya belanja daerah selain itu juga karena prioritas kegiatan pembangunan pada tahun tersebut. Pola perkembangannya sebagaimana terlihat pada Grafik 4.4 dibawah ini.



Gambar 4.4 Grafik Pertumbuhan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi 2003-2010

Jika dilihat dari perkembangan menurut jenis belanjanya belanja pegawai merupakan belanja yang paling besar realisasinya dibandingkan jenis belanja lainnya baik belanja pegawai pada belanja tidak langsung maupun pada belanja langsung. Peningkatan realisasi belanja pegawai pada belanja tidak langsung mengalami peningkatan mulai Tahun 2006 hingga mencapai pertumbuhan tertinggi pada Tahun 2007 mencapai 291,01%.

commit to user

Hal ini terjadi karena mulai Tahun 2005 Pemerintah Kabupaten Ngawi mengadakan pengangkatan CPNS baik dari tenaga honorer, umum maupun pengangkatan sekdes menjadi PNS sehingga terjadi peningkatan kebutuhan belanja gaji pada belanja tidak langsung sebagaimana dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

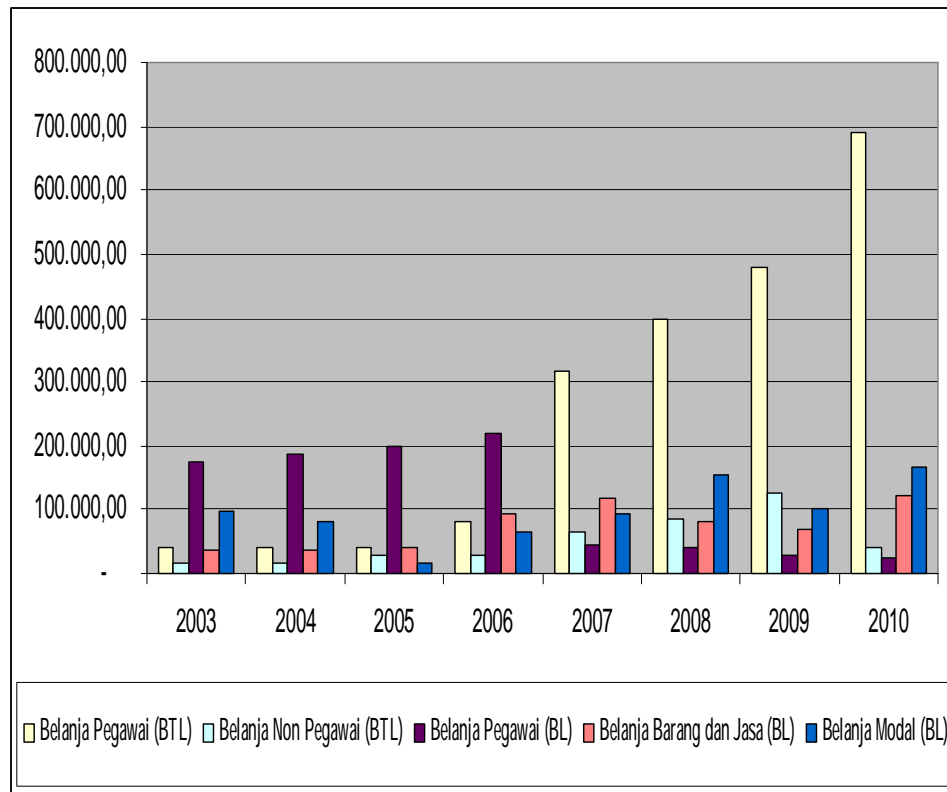
Tabel 4.13 Pengangkatan CPNS Kabupaten Ngawi Tahun 2005-2010

TAHUN	CPNS			JUMLAH
	Honorer	Sekretaris Desa	Umum	
2005	459	-	156	615
2006	1.464	-	-	1.464
2007	1.272	80	-	1.352
2008	479	29	235	743
2009	546	15	352	913
2010	-	-	196	196
JUMLAH	4.220	124	939	5.283

Sumber : Badan Kepegawaian Daerah Kab. Ngawi

Belanja pegawai pada belanja langsung dari Tahun 2003 sampai dengan 2006 mengalami peningkatan namun mulai Tahun 2007 mengalami penurunan hal ini menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk menertibkan dalam hal pemberian honorarium berkaitan dengan program kegiatan sesuai peraturan yang berlaku.

Pola perkembangan realisasi belanja menurut jenisnya dapat dilihat pada Tabel 4.14 dan Grafik 4.5 dibawah ini.



Gambar 4.5 Grafik Perkembangan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 menurut jenisnya

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2003-2010 diolah

Tabel 4.14 Perkembangan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 menurut Jenis Belanja

TH	Belanja Tidak Langsung				Belanja Langsung					
	Belanja Pegawai	Δ %	Belanja Non Pegawai	Δ %	Belanja Pegawai	Δ %	Belanja Barang Jasa	Δ %	Belanja Modal	Δ %
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(9)	(10)
2003	39.597,60		15.094,30		172.863,80		37.089,10		95.478,10	
2004	41.050,96	3,67	15.180,90	0,57	188.351,07	8,96	38.361,00	3,43	80.434,30	(15,76)
2005	41.592,30	1,32	29.392,30	93,61	200.833,70	6,63	42.297,80	10,26	16.620,50	(79,34)
2006	80.530,50	93,62	29.512,60	0,41	217.644,60	8,37	91.858,00	117,17	63.837,50	284,09
2007	314.878,80	291,01	63.142,00	113,95	45.565,00	(79,06)	117.857,80	28,30	93.062,40	45,78
2008	397.746,50	26,32	86.085,10	36,34	41.279,50	(9,41)	80.071,30	(32,06)	155.168,40	66,74
2009	479.018,70	20,43	126.638,40	47,11	28.353,90	(31,31)	67.991,90	(15,09)	101.671,40	(34,48)
2010	689.575,00	43,96	38.885,70	(69,29)	22.550,40	(20,47)	121.967,60	79,39	168.036,80	65,27

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka diolah

2. Analisis Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Ngawi

Untuk menyatukan persepsi kelompok belanja menjadi satu karena Pemerintah Kabupaten Ngawi pada kurun waktu Tahun 2003 sampai dengan 2006 masih menggunakan Kepmendagri 29/2002 sedangkan Tahun 2007 sampai dengan 2010 menggunakan Permendagri 13/2006 dan dalam penelitian ini variabel yang digunakan merupakan kelompok belanja menurut Permendagri 13/2006 maka dari kelompok belanja menurut Kepmendagri 29/2002 harus ditransformasikan menjadi kelompok belanja menurut Permendagri 13/2006 yaitu belanja pada Tahun 2003 sampai dengan 2006 yang saat itu masih menggunakan Kepmendagri 29/2002 disesuaikan dengan kelompok belanja pada Permendagri 13/2006 sehingga didapatkan satu kesatuan kelompok belanja yang sama. Hasil transformasi belanja daerah dari Kepmendagri 29 Tahun 2002 menjadi Permendagri Tahun 2006 tersebut dapat dilihat pada Lampiran 1.

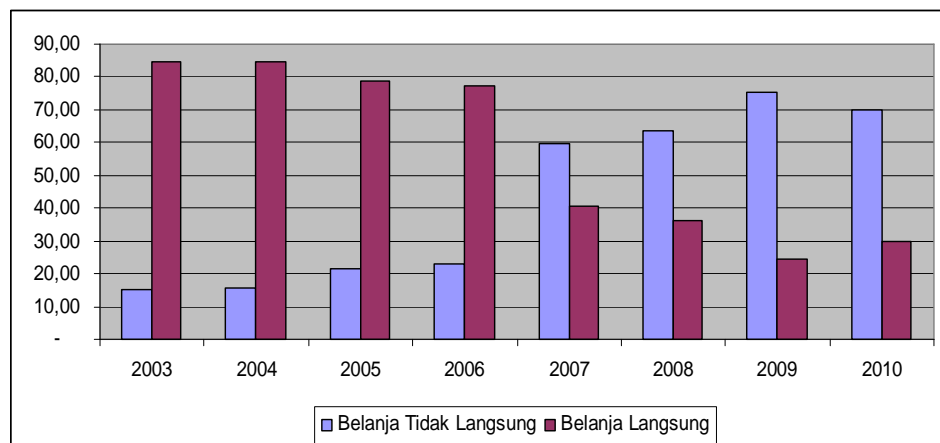
Setelah didapatkan satu persepsi dalam pengelompokan belanja maka dapat dihitung proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap belanja daerah pemerintah Kabupaten Ngawi dengan menggunakan rumus (Widodo,1990:36) seperti yang dijelaskan pada Bab III, perbandingan antara belanja tidak langsung dengan belanja langsung sebesar 15,19 : 84,81 Tahun 2004 sebesar 15,47 : 84,53, Tahun 2005 sebesar 21,46 : 78,54, Tahun 2006 sebesar 22,77 : 77,23. sehingga dapat diketahui bahwa di Tahun 2003 sampai dengan 2006 belanja langsung

masih lebih besar porsinya dibandingkan belanja tidak langsung. Namun mulai Tahun 2007 perbandingan keduanya berubah terbalik menjadi 59,58 : 40,42, Tahun 2008 sebesar 63,63 : 36,37, Tahun 2009 sebesar 75,36 : 24,64, Tahun 2010 sebesar 69,98 : 30,02 sehingga diketahui bahwa sejak 2007 sampai dengan 2010 porsi belanja tidak langsung menjadi lebih besar daripada belanja langsung terutama di Tahun 2009 mencapai 75,36 % anggaran belanja untuk belanja tidak langsung dan hanya menyisakan 24,64 untuk belanja langsung sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 4.15 dan Grafik 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.15 Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah Tahun 2003-2010

Tahun	Belanja Tidak Langsung	Proporsi (%)	Belanja Langsung	Proporsi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2003	54.691,90	15,19	305.431,00	84,81
2004	56.231,86	15,47	307.146,37	84,53
2005	70.984,60	21,46	259.752,00	78,54
2006	110.043,10	22,77	373.340,10	77,23
2007	378.020,80	59,58	256.485,20	40,42
2008	483.831,60	63,63	276.519,20	36,37
2009	605.657,10	75,36	198.017,20	24,64
2010	728.460,70	69,98	312.554,80	30,02

Sumber : Kabupaten Ngawi Dalam Angka diolah



Gambar 4.6 Grafik Proporsi Belanja Tidak Langsung dan Proporsi Belanja Langsung Tahun 2003-2010

Sumber : Kabupaten Ngawi dalam Angka 2003-2010 diolah

Dilihat dari proporsi belanja tidak langsung dan belanja langsung dari tahun ke tahun proporsi belanja tidak langsung mengalami peningkatan hal ini karena adanya peningkatan belanja pegawai yang disebabkan :

- Peningkatan jumlah PNS yang disebabkan pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS, pengangkatan sekdes menjadi PNS, pengadaan CPNS dari jalur umum serta mutasi antar daerah sehingga kebutuhan gaji PNS meningkat tajam walaupun seharusnya alokasi gaji untuk PNS telah diperhitungkan dalam DAU
- Kebijakan Pemerintah menaikkan gaji PNS berturut-turut dalam kurun waktu 4 tahun terakhir
- Adanya tambahan penghasilan bagi PNS guru dan tunjangan profesi guru PNSD

3. Analisis Pengaruh Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Ngawi

Untuk mengetahui pengaruh belanja tidak langsung dan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Ngawi dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan menggunakan SPSS 16. Namun karena keterbatasan data yang ada di wilayah penelitian maka untuk mencukupi persyaratan jumlah data sesuai analisis regresi maka diadakan pemecahan terhadap data yang ada menjadi data kuartalan dengan menggunakan metode interpolasi menurut insukindro dalam Siti Aisyah Tri Rahayu (2004) dengan rumus :

$$Q1t = 1/4\{Yt - 4,5/12(Yt - Yt-1)\} \dots\dots\dots (4.1.a)$$

$$Q2t = 1/4\{Yt - 1,5/12(Yt - Yt-1)\} \dots\dots\dots (4.1.b)$$

$$Q3t = 1/4\{Yt + 1,5/12(Yt - Yt-1)\} \dots\dots\dots (4.1.c)$$

$$Q4t = 1/4\{Yt + 4,5/12(Yt - Yt-1)\} \dots\dots\dots (4.1.d)$$

keterangan :

Qkt = data kuartal ke-k tahun t. k = 1,2,3,4

Yt = data yang diinterpolasi pada tahun t

Yt-1 = data dari tahun sebelumnya

Hasil interpolasi data dapat dilihat dalam lampiran 2, 3 dan 4

a) Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda untuk mengetahui pengaruh belanja langsung dan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi dengan menggunakan model persamaan ekonometrika (Gujarati, 2003) sebagai berikut:

$$PEK_t = \alpha_0 + \alpha_1 BTL_t + \alpha_2 BL_t + e \quad \dots (4.2)$$

Dimana :

PEK = Pertumbuhan Ekonomi

α = Konstanta

BL = Belanja Langsung

BTL = Belanja Tidak langsung

e = error

dari hasil SPSS 16 didapatkan persamaan sebagai berikut :

$$PEK = 0,908 + 0,0000002465 BTL + 0,0000002177 BL$$

Se (0,231) (0,000) (0,000)

t (3,930)* (4,127)* (0,754)

F statistik = 8,892*

Adjusted R Square = 0,337

Standar Error of Estimate (SEE) = 0,20194

Uji Asumsi Klasik

a. Durbin Watson = 1,855

b. VIF = 1,166

c. tolerance = 0,857

Keterangan : *Level Of Significants*

* = jika signifikansi kesalahan $< 1\%$

Namun sebelum menginterpretasikan data harus diadakan pengujian terhadap data tersebut yaitu uji asumsi klasik karena data yang baik harus bebas dari asumsi klasik dan uji statistik.

2) Uji Asumsi Klasik

a) Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (Ghozali, 2002). Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Nilai *cut off* yang umum dipakai adalah 0,10 atau nilai VIF > 10 . Dari hasil SPSS 16 dapat diketahui nilai VIF sebesar 1,166 dan nilai *tolerance* 0,857. dari ketentuan yang ada bahwa jika nilai VIF < 10 dan nilai *tolerance* $> 0,10$ maka tidak terjadi multikolinieritas.

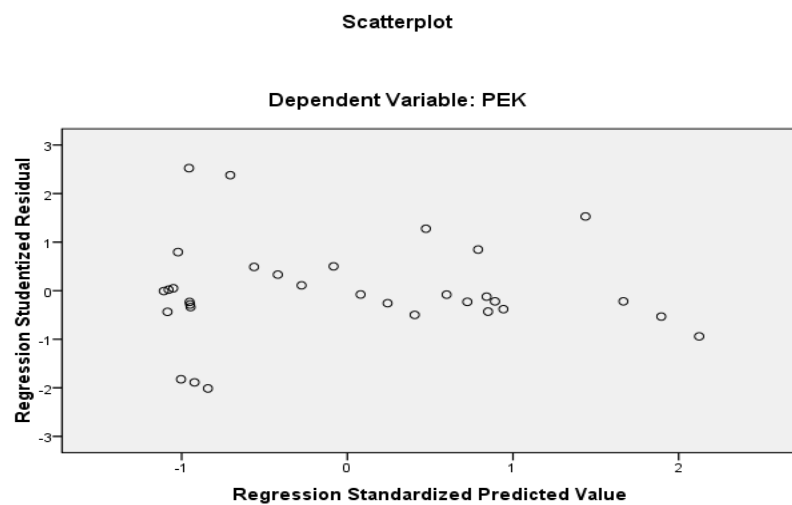
b) Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi berganda linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya). Dari hasil analisis dengan SPSS 16 dapat diketahui nilai Durbin Watson menunjukkan angka 1,855 nilai d_l dan d_u dapat dilihat dengan Tabel Durbin Watson dengan $n = 32$ dan $k = 2$, $d_l = 1,31$, $d_u = 1,57$. Oleh karena DW 1,855 lebih besar daripada Batas Atas (d_u) 1,57 dan kurang dari $4 - 1,57$ ($d_U > DW \leq 4 - d_U$ atau $1,57 > 1,855 \leq 2,43$), maka dapat disimpulkan tidak terdapat autokorelasi positif maupun negatif pada model regresi

c) Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Dari hasil analisis dengan menggunakan SPSS 16 dapat diketahui grafik plot terlihat titik-titik menyebar secara acak serta tersebar tidak membentuk pola yang jelas di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas dan model persamaan tersebut layak digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi, sebagaimana terlihat pada gambar 4.8 dibawah ini :

commit to user



Gambar 4.8 Scatterplot

3) Uji Statistik

a) Uji F

Uji F digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi. Untuk menguji hipotesis digunakan F dengan kriteria sebagai berikut :

- (1) *Quick Look* : bila nilai $F > 4$ maka H_0 dapat ditolak pada derajat kepercayaan 5%.

- (2) Membandingkan nilai F hasil hitungan dengan nilai F menurut tabel. Bila F hasil perhitungan $>$ F tabel, maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

Didapat F hasil hitung $8,892 > 4$ dan dilihat dari signifikansi $0,001 < 0,05$ sedangkan jika dibandingkan nilai F hasil hitung dengan F tabel sebesar 3,32 ($d = 30, n = 2$) terlihat nilai F hitung lebih besar dari F tabelnya maka kedua variabel ini dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi

b) Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel bebas menjelaskan variabel terikat. Dalam penelitian ini lebih menggunakan nilai adjusted R² karena nilai adjusted R² dapat naik atau turun apabila suatu variabel independen ditambahkan ke dalam model tidak seperti R² yang pasti meningkat setiap penambahan variabel independen tidak peduli berpengaruh signifikan ataupun tidak sehingga cenderung bias. Dari tampilan output SPSS besarnya Adjusted R² adalah 0,337, hal ini berarti 33,7 % variasi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi bisa dijelaskan oleh variasi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL) dan sisanya ($100 \% - 33,7 \% = 66,3 \%$) dijelaskan oleh sebab-sebab lain di luar model. *Standar Error of Estimate*

(SEE) sebesar 0,20194. Makin kecil nilai SEE akan membuat model regresi semakin tepat dalam memprediksi variabel terikat.

c) Uji t

Besarnya angka signifikansi individual digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh masing – masing variabel independen yaitu Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara individual terhadap variabel terikat yaitu pertumbuhan ekonomi.

- a. Pengaruh Belanja Tidak Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi

Hipotesis yang diajukan adalah :

$H_0 : \beta = 0$, tidak terdapat pengaruh yang signifikan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_a : \beta \neq 0$, terdapat pengaruh yang signifikan belanja tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 4,127 sesuai rumus *quick look* nilainya lebih besar dari 2 dan jika dibandingkan nilai t tabel dengan $\alpha = 0,05$ adalah 1,96 terlihat t hitung lebih besar dari t tabel maka H_0 ditolak berarti Belanja Tidak Langsung berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi. Jika dilihat dari tingkat probabilitas signifikansi sebesar

0,000 < 0,05 sehingga hipotesis a diterima atau terdapat pengaruh Belanja Tidak Langsung dengan pertumbuhan ekonomi

- b. Pengaruh Belanja Langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi

Hipotesis yang diajukan adalah :

$H_0 : \beta = 0$, tidak terdapat pengaruh yang signifikan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi

$H_b : \beta \neq 0$, terdapat pengaruh yang signifikan belanja langsung terhadap pertumbuhan ekonomi

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung sebesar 0,754 dan sesuai rumus *quick look* nilainya lebih kecil dari 2 dan jika dibandingkan nilai t tabel dengan $\alpha = 0,05$ adalah 1,96 terlihat t hitung lebih kecil dari t tabel maka H_0 diterima berarti belanja langsung tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi. Jika dilihat dari tingkat probabilitas signifikansi sebesar $0,457 > 0,05$ sehingga hipotesis b ditolak atau tidak terdapat pengaruh belanja langsung dengan pertumbuhan ekonomi

c. Pembahasan

Dari pengujian yang telah dilakukan sebelumnya ternyata menunjukkan model regresi telah terbebas dari asumsi klasik . Interpretasi ekonomi yang dapat diperoleh adalah :

- 1) Nilai konstanta sebesar 0,908 menunjukkan bahwa jika variabel bebas dianggap konstan, maka rata-rata pertumbuhan ekonomi sebesar 0,908 %. Angka sebesar itu dipengaruhi variabel-variabel lain diluar model.
- 2) Koefisien variabel Belanja Tidak Langsung adalah 0,0000002465 dan nilai tersebut positif maka peningkatan realisasi Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi secara signifikan. Jika realisasi Belanja Tidak Langsung naik 1 juta rupiah maka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi akan naik 0,0000002465 % dengan asumsi variabel lain konstan. Nampak pada nilai koefisien itu bahwa peranan Belanja Tidak langsung dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi, terutama karena meningkatnya belanja pegawai terutama belanja gaji hal ini mengakibatkan meningkatnya pendapatan masyarakat khususnya PNS sehingga tingkat konsumsi masyarakat yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi. Walaupun Belanja Tidak langsung mempunyai pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi tetapi

seyogyanya hal tersebut tidak diinterpretasikan secara matematis karena meskipun mempunyai pengaruh jika sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai rasanya tidak adil bagi masyarakat dan sebaiknya harus bijaksana dalam menyikapi hal tersebut.

- 3) Koefisien variabel Belanja Langsung adalah 0,0000002177 dan nilai tersebut positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi. Nampak pada nilai koefisien itu bahwa peranan Belanja Langsung dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi tidak signifikan hal ini dimungkinkan karena dalam belanja langsung terjadi inefisiensi dalam penggunaan anggaran selain itu karena kecilnya anggaran belanja langsung yang terdiri dari belanja barang/jasa dan belanja modal yang menurut teori seharusnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karena kedua belanja tersebut menyentuh langsung terhadap masyarakat ternyata tidak mempunyai pengaruh signifikan karena dana yang terbatas itu harus dibagi sesuai urusan wajib maupun pilihan sesuai program kegiatan di tiap-tiap SKPD sehingga tidak cukup untuk menciptakan program kegiatan besar yang mempunyai multiple efek seperti membangun infrastruktur yang memerlukan anggaran yang besar. Dengan dana yang terbatas dapat pula menciptakan program kegiatan yang dapat

mendorong faktor- faktor penentu pertumbuhan ekonomi lainnya misalnya faktor modal dapat mendorong masuknya investasi dari luar sehingga pemerintah dengan dana yang terbatas dapat memfasilitasi masuknya investasi yang dapat membuka lapangan pekerjaan dan dapat menyerap tenaga kerja. Faktor penentu lainnya adalah penduduk angkatan kerja, potensi tenaga kerja dapat ditingkatkan dari kualitasnya dalam rangka proses adopsi dan pengembangan teknologi, dengan menciptakan program kegiatan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal. Tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Ngawi untuk meningkatkan proporsi belanja langsung khususnya belanja modal dengan menekan belanja tidak langsung khususnya belanja pegawai karena anggaran seharusnya lebih berpihak kepada rakyat tanpa mengurangi hak pegawai dan diharapkan dengan meningkatnya belanja modal dapat meningkat pula pertumbuhan ekonomi daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 angka pertumbuhannya fluktuatif dengan pola kecenderungan menurun selama 2003-2010, dengan rata-rata pertumbuhan belanja daerah Kabupaten Ngawi selama 8 tahun terakhir sebesar 17,77 % sedangkan perkembangan realisasi belanja daerah secara nominal menunjukkan kecenderungan meningkat.
2. Proporsi belanja tidak langsung terhadap belanja daerah di Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 memiliki kecenderungan meningkat, sebaliknya proporsi belanja langsung terhadap belanja daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2003-2010 memiliki kecenderungan menurun dengan perbandingan 15,19% : 84,81% di Tahun 2003 menjadi 69,98 % : 30,02 % di Tahun 2010.
3. Belanja Tidak Langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi, sedangkan Belanja Langsung mempunyai nilai koefisien positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah Kabupaten Ngawi.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian yang dilakukan atas beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk mengerakan pembangunan melalui belanja daerah dan peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah di Kabupaten Ngawi.

1. Dengan keterbatasan dana dalam APBD, Pemerintah Kabupaten Ngawi diharapkan dalam mengalokasikan belanja daerahnya secara proporsional dan penajaman prioritas dalam pengeluaran APBD harus menjadi kebijakan utama dengan mengedepankan prinsip efisiensi dan efektivitas. Dengan struktur pengeluaran APBD yang sangat didominasi pengeluaran rutin terutama belanja pegawai. Hal yang dapat dilakukan dengan mengurangi laju pertumbuhan jumlah pegawai namun apabila jumlah pegawai yang besar tersebut disertai dengan produktivitas, diharapkan pencapaian standar pelayanan minimal dalam berbagai layanan dasar bisa lebih cepat terwujud sehingga mampu memberikan efek positif terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
2. Walaupun dari hasil penelitian diatas menunjukkan adanya pengaruh yang positif dan signifikan antara belanja tidak langsung terhadap belanja daerah tetapi seyogyanya hal tersebut tidak diinterpretasikan secara matematis karena meskipun mempunyai pengaruh tapi jika sebagian besar digunakan untuk belanja pegawai rasanya tidak adil

bagi masyarakat dan sebaiknya harus bijaksana dalam menyikapi hal tersebut.

3. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi perlu meningkatkan potensi daerah yang ada, dengan peran pemerintah daerah dalam melaksanakan program yang dapat memacu pertumbuhan ekonomi seperti program pengembangan sektor pertanian sebagai sektor basis, sektor perdagangan dan sektor jasa-jasa. Dengan keterbatasan dana APBD cara lain yang dapat ditempuh dengan menarik investor dari luar daerah dan bermitra pihak swasta dengan pemerintah daerah sebagai fasilitator.

